



**Pengaruh Transparansi, Kompetensi Pemerintah Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Wuluhan**

**SKRIPSI**

*(untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana S-1 ekonomi pada minat program studi akuntansi)*

**Diajukan Oleh :**

**Agiska**

**NIM : 18104193**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER**

**2022**



**Pengaruh Transparansi, Kompetensi Pemerintah Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Wuluhan**

**SKRIPSI**

*(untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana S-1 ekonomi pada minat program studi akuntansi)*

**Diajukan Oleh :**

**Agiska**

**NIM : 18104193**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER**

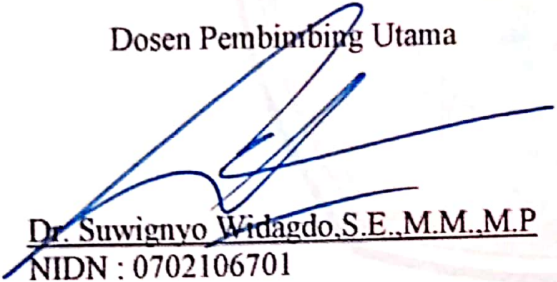
---

**PENGARUH TRANSPARANSI KOMPETENSI PEMERINTAH DESA  
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI  
KEUANGAN DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA DI KECAMATAN WULUHAN**


NAMA : AGISKA  
NIM : 18.104193  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
MATA KULIAH DASAR : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui Oleh:


Dosen Pembimbing Utama

  
Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P.  
NIDN : 0702106701

Dosen Pembimbing Asisten

  
Dr. Lia Rachmawati, S.E., M.Ak  
NIDN : 0706128203

Mengetahui,  
K.A. Prodi Akuntansi

  
Nurshadrina Kartika Sari  
NIDN : 0714088901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER

**PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPTENSI PEMERINTAH DESA,  
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN SISTEM AKUNTANSI  
KEUANGAN DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA DI KECAMATAN WULUHAN**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Skripsi pada :Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022

Jam : 13.00- 14.00 WIB

Tempat : STIE Mandala Jember

Disetujui Oleh Tim Penguji Skripsi

Dr. Diana Dwi Astuti, M.Si

Ketua Tim Penguji

Dr. Lia Rachmawati, S.E.,M.Ak

Sekretaris Penguji

Dr. Suwignyo Widagdo, S.E.,MM.,M.P

Anggota Penguji



.....  
.....  
.....

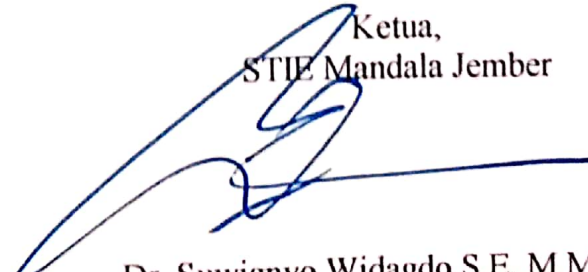
Mengetahui,

Ketua Program Studi,  
Akuntansi



Nurshadrina Kartika Sari  
NIDN : 0714088901

Ketua,  
STIE Mandala Jember



Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P  
NIDN : 0702106701

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Agiska  
**NIM** : 18.104193  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Minat Studi** : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PEGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN WULUHAN merupakan hasil karya ilmiah yang saya buat sendiri. Apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menanggung resiko dibatalkannya skripsi yang telah saya buat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Jember, 17 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

  
  
Agiska

## MOTTO

“ANGIN TIDAK BERHEMBUS UNTUK MENGGOYANGKAN  
PEPOHONAN, MELAINKAN MENGUJI KEKUATAN AKARNYA”

-Ali Bin Abi Thalib-

“ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG MELAINKAN SESUAI  
KESANGGUPANNYA”

-Qs Al Baqarah 286-

“KITA DILAHIRKAN UNTUK JADI NYATA BUKAN UNTUK JADI  
SEMPURNA”

-Min Yoongi-



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan gelar sarjana S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember.

Proses penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak, untuk penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan anugerah dan berkah yang melimpah dalam menjalankan proses dan tanggung jawab penulis sebagai mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember.
2. Bapak Dr. Suwignyo Widagdo S.E., M.M., M.P selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember Sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberi semangat serta pengarahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi yang telah membina penulis serta mengayomi seluruh mahasiswa maupun mahasiswi program studi Akuntansi.
4. Ibu Dr. Lia Rachmawati, S.E., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Asisten yang selalu memberikan pengarahan serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mandala Jember yang membantu penulis selama proses studi.
6. Kedua orang tua ibu Mujianah dan bapak Bastomi yang telah memberikan semangat serta mendukung segala sesuatu baik dari segi finansial sampai dengan doa-doa baiknya.
7. Sahabat penulis yaitu “ Siska, Anis, Vira dan Ayuk” atas segala dukungan agar penulis dapat menyelesaikan ini tepat pada waktunya. Tanpa kalian

cerita di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember tidak akan menyenangkan ini. *No other words but thank you very much, you are the best friend I have ever met.*

8. Kepada Vikiy Dwi Andika pacar yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
9. Seluruh mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2018 yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di STIE Mandala selama kurang lebih 4 tahun.
10. Semua teman penulis yang selalu memberikan dorongan untuk terus belajar dan semangat. Penulis berharap mereka mendapat imbalan yang setimpal atas bantuany-bantuannya dan dapat menjadikan bantuan ini sebagai ibadah.

Penulis menyadari adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Terimakasih

Jember, 17 Juli 2022

Penulis,



Agiska



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	7
1.3.Tujuan Penelitian.....	7
1.4.Manfaat Penelitian.....	8
1.5.Pembatasan Masalah.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1.Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
2.2.Kajian Teori.....	20
2.2.1 Teori Stewardship.....	20
2.2.2 Pemerintah Desa .....	21
2.2.3 Transparansi.....	25

2.2.4 Kompetensi Pemerintah Desa.....	27
2.2.5 Aksesibilitas Laporan Keuangan .....	30
2.2.6 Sistem Akuntansi Keuangan Desa.....	32
2.2.7 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	33
2.3.Kerangka Konseptual .....	37
2.4.Hipotesis .....	39

### **BAB III. METODE PENELITIAN ..... 43**

3.1.Gambaran Singkat Objek Penelitian.....	43
3.2.Populasi dan Sampel.....	43
3.2.1 Populasi .....	43
3.2.2 Sampel .....	44
3.3.Jenis Penelitian .....	44
3.4.Identifikasi Variabel Penelitian .....	45
3.5.Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	46
3.6.Metode Pengumpulan Data .....	50
3.7.Uji Instrument.....	50
3.7.1 Uji Validitas.....	51
3.7.2 Uji Reabilitas .....	51
3.8. Uji Asumsi Klasik .....	51
3.8.1 Uji Normalitas .....	51
3.8.2 Uji Multikolinearitas.....	52
3.8.3 Uji Heterokedastisitas.....	52
3.9. Analisis Regresi Berganda.....	53
3.10 Pengujian Hipotesis .....	54
3.10.1 Hipotesis Parsial (Uji t).....	54
3.10.2 Hipotesis Simultan (Uji F).....	54
3.11 Koefisien Determinasi .....	55

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN INTERPRETASI**

4.1. Gambaran Umum Kecamatan Wuluhan.....	56
---	----

4.1.1 Identifikasi Responden .....	58
4.1.2 Gambaran Umum Tanggapan Responden .....	60
4.2 Analisis Hasil dan Pembahasan .....	69
4.2.1 Uji Analisis Data .....	69
4.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	72
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....	75
4.2.4 Uji Hipotesis .....	78
4.2.5 Koefisien Determinasi .....	81
4.3 Interpretasi .....	82

## **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	89
5.2. Implikasi .....	91
5.3. Saran .....	92

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 4.1 Jumlah Sampel Penelitian .....	57
Tabel 4.2 Distribusi Jenis Kelamin Responden .....	58
Tabel 4.3 Distribusi Umur Responden.....	58
Tabel 4.4 Distribusi Tingkat Pendidikan .....	59
Tabel 4.5 Jumlah Data Responden.....	60
Tabel 4.6 Hasil Tanggapan Responden Variabel X1 .....	62
Tabel 4.7 Hasil Tanggapan Responden Variabel X2 .....	63
Tabel 4.8 Hasil Tanggapan Responden Variabel X3 .....	65
Tabel 4.9 Hasil Tanggapan Responden Variabel X4 .....	66
Tabel 4.10 Hasil Tanggapan Responden Variabel Y .....	67
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Validitas.....	70
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Reabilitas .....	71
Tabel 4.13 Hasil Pengujian Normalitas .....	73
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Multikolonieritas .....	74
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	76
Tabel 4.16 Hasil Uji t (Parsial) .....	78
Tabel 4.17 Hasil Uji F (Simultan).....	81
Tabel 4.18 Hasil Koefisien Determinasi .....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual .....	38
Gambar 4.1. Hasil Histogram Uji Normalitas.....	73
Gambar 4.2. Hasil Uji Heterokedastisitas .....	75



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuisisioner Penelitian

Lampiran 2: Data Responden

Lampiran 3: Tabulasi Data Kuisisioner Penelitian

Lampiran 4: Hasil Uji Instrument

Lampiran 5: Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 6: Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Lampiran 7: Hasil Uji Hipotesis





## ABSTRAK

### **PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN WULUHAN**

Oleh Agiska

Dr. Suwignyo Widagdo. S.E., M.M., M.P

Dr. Lia Rachmawati, S.E., M.Ak

**Program Studi Akuntansi**

**STIE Mandala Jember**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Wuluhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, pengambilan datanya dengan menyebarkan kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa yang ada di setiap desa di kecamatan Wuluhan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*. Metode analisis data yang digunakan yakni Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sedangkan kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem akuntansi keuangan desa tidak berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Secara simultan transparansi, kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

**Kata kunci: Transparansi, Kompetensi Pemerintah Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Pemerintah Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

## **ABSTRACT**

### ***THE EFFECT OF TRANSPARENCY, VILLAGE GIVERMENT COMPETENCE, ACCESSIBILITY TO FINANCIAL REPORTS, AND VILLAGE FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS ON VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY IN WULUHAN DISTRIC***

***By Agiska***

**Dr. Suwignyo Widagdo, S.E.,M.M.,M.P**

**Dr. Lia Rachmawati, S.E.,M.Ak**

***Accounting Study Program***

**STIE Mandala Jember**

This study aims to determine the effect of transparency, village givernment competence, accessibility of financial reports, and village financial accounting system on village financial management accountability in Wuluhan distric. The method used in this study is a quantitative method, data collected by distributing questionnaires. The population in study were all village officials in every village in the Wuluhan sub-district. The sampling used was purposive sampling. The data analysis methid used is Multiple Linear Regression. The result of this study indicate that transparency partially affects the accountability of village financial management. Meanwhile, village government competence, accessibility of financial reports, and village financial accounting systems have no partial effect on village financial management accountability. Simultaneously, transparency, village government competence, accessibility of financial reports, and village financial accounting systems affect village financial management accountability.

**Keywords: Transparency, Competene of Village Government, Accessibility of Financial Statements, Village Government Accounting System, Accountability of Village Financial Management**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Pada era sekarang ini pemerintahan khususnya pemerintah Indonesia telah mengalami perubahan besar, salah satunya adalah kemajuan ilmu akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah ilmu akuntansi yang melibatkan proses pencatatan dan pelaporan transaksi yang berhubungan dengan pemerintahan. Pemerintah Indonesia mengalami perubahan besar ditandai dengan adanya reformasi politik yang mulai merambah ke keuangan negara, yaitu dengan diberlakukannya otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk kewenangan yang ditujukan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dalam rangka mengatur dan mengurus sistem pemerintahannya sendiri. Namun dalam prakteknya selalu mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Otonomi daerah juga merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah pusat untuk mencapai kemandirian daerah yang sentral dalam pemberdayaan daerah. Dengan adanya otonomi daerah secara umum pemerintah pusat tidak lagi membantu pemerintah daerah, karena diharapkan pemerintah daerah lebih mandiri dalam merancang dan melaksanakan semua kegiatannya, sehingga pemerintah harus secara efektif menentukan biaya daerahnya sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan yang dimaksud dengan desa adalah persekutuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur

kebutuhan masyarakat. Di dalam sebuah desa tentunya memiliki sebuah susunan pemerintahan yang biasa disebut dengan pemerintah desa. pemerintah desa atau pemerintah daerah adalah tingkat pemerintahan terendah dan berhubungan langsung dengan penduduk desa. pemerintah desa juga memiliki tugas membantu pemerintah pusat dalam memberikan bantuan langsung kepada masyarakat umum. Pemerintah desa mendapat kesempatan besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup penduduk.

Pelaksanaan pembangunan yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat akan membutuhkan dana. Pencairan dana dari pemerintah pusat ke desa pastinya dalam jumlah yang besar, hal tersebut menandakan bahwa pemerintah pusat menuntut pertanggungjawaban yang besar pula. Pada tahun 2015 sudah dilakukan pengalokasian dana desa oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 20,7 Triliun bagi 74.093 desa, ditahun 2016 sebanyak Rp. 40,98 Triliun bagi 74.75 desa, serta ditahun 2017 kembali meningkat sebanyak Rp. 60 Triliun untuk berbagai desa yang berada disemua penjuru Indonesia. Selain dana desa, ada juga pendapatan desa lain seperti alokasi dana desa, dana bantuan berasal dari pemerintah baik provinsi, kota, sampai kabupaten, serta dana bagi hasil pajak maupun retribusi daerah (Fadil, 2020).

Pemakaian alokasi dana desa rawan terhadap praktik kecurangan yang berupa penyelewengan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh

karena itu kedudukan masyarakat sangat penting untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa agar perkembangan pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana mestinya serta semaksimal mungkin mencegah kecurangan. Hal ini terjadi karena 70% dari ADD (Alokasi Dana Desa) ditujukan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat desa khususnya di sektor pembangunan atau perbaikan sarana prasarana desa, dan 30% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan pemerintah desa serta operasional Badan Permusyawaratan Desa (Febriana, 2021).

Pemerintah desa diwajibkan dapat menerapkan akuntabilitas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, karena segala aktivitas pelaksanaan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan terhadap warga desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tata pemerintahan yang baik dapat tercapai. Diasumsikan bahwa volume dana desa yang sangat besar akan tumbuh setiap tahunnya, sehingga diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang bertanggungjawab.

Akuntabilitas adalah salah satu prinsip penting yang harus diwujudkan dalam pengelolaan keuangan dari suatu entitas baik dalam bisnis maupun dalam pemerintahan. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan yang merupakan salah satu hal penting bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap individu, kelompok maupun instansi yang diberi amanah untuk memenuhi tanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) akuntabilitas diartikan sebagai mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi berbagai faktor yaitu yang pertama adalah transparan. Herlina Dkk (2021) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Jika prinsip transparansi dapat diterapkan dengan baik maka menimbulkan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah desa menjadi baik, sehingga menyebabkan pemerintah desa tidak segan dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara akurat serta memberikan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan karena pemerintah desa dalam mengelola anggaran desa ini tidak ada yang ditutupi atau transparan.

Faktor kedua dalam akuntabilitas adalah kompetensi dari pemerintah desa, dalam mewujudkan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa adalah kompetensi dari pengelola keuangan tersebut, kompetensi atau kemampuan yang ada pada pengelola menjadi ketentuan apakah akuntabilitas pada desa dapat dilakukan dengan baik dan maksimum atau tidak. Febriana (2021) mengemukakan bahwa kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana menunjukkan



bahwasanya kompetensi pemerintah desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Faktor ketiga yang yaitu aksesibilitas laporan keuangan, aksesibilitas merupakan bagian dari dasar-dasar tata pemerintahan yang bagus, karena untuk mencapai tata pemerintahan yang baik adalah akses pada laporan keuangan yang bagus dan sesuai dengan norma yang berlaku. aksesibilitas memiliki arti bahwa memberikan kemudahan akses bagi beberapa pihak yang membutuhkan informasi terkait laporan keuangan dengan mudah, sebab laporan keuangan pemerintah adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dipublikasikan oleh pemerintah.

*Indonesia corruption watch* menyatakan bahwa kasus korupsi dibidang anggaran desa adalah kasus terbanyak yang diadili oleh aparaturnya penegak hukum dibandingkan dengan sector lainnya, dimana kasus yang terjadi terus meningkat dari rentang tahun 2016 hingga 2021. Penyelewengan dana desa dapat terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu seperti desa masih belum siap dalam mengelola dana tersebut, kurangnya sumber daya manusia yang ada, pemerintah desa yang tidak transparan serta akuntabel. Pemerintah pusat telah memberikan anggaran dana desa yang cukup besar bagi setiap desa, dengan tujuan dapat digunakan sebagai pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Belum adanya sistem pengawasan yang komprehensif terhadap dana desa sehingga menyebabkan banyaknya penyelewengan dana desa, sehingga pemerintah desa dituntut untuk selalu melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan desa dengan memanfaatkan teknologi yang tengah berkembang pesat.

Fenomena atau permasalahan disekitar yang berkaitan dengan transparansi pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa yakni, permasalahan terkait dugaan korupsi pengelolaan tanah kas pada tahun 2017 di pemerintahan desa Lojejer Kecamatan Wuluhan. Warga menilai pengelolaan tanah kas desa tahun 2017 tidak melalui mekanisme lelang yang benar sesuai peraturan yang berlaku, dimana pembayaran yang seharusnya dibayarkan langsung melalui bendahara desa namun pada kasus ini pembayaran dilakukan melalui kepala desa secara langsung. Maka dari itu timbul kecurigaan masyarakat terkait dengan pengelolaan tanah kas desa. dari kasus tersebut menunjukkan bahwa kurangnya dalam menerapkan transparansi terkait pengelolaan keuangan desa (Faktajember.com).

Sementara itu pengelolaan dana desa yang dilakukan di seluruh desa di kecamatan Wuluhan sudah berjalan dengan baik. Namun, masih banyak desa yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pengalokasian, pengawasan anggaran desa, serta kurangnya transparansi informasi mengenai penggunaan dana desa mengakibatkan munculnya statemen negatif masyarakat mengenai penyalahgunaan dana desa.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah kompetensi pemerintah desa berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
5. Apakah transparansi, kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui apakah kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk mengetahui apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

4. Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
5. Untuk mengetahui apakah transparansi, kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama berada di bangku perkuliahan.

2. Bagi almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bisa digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian ataupun menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bagi perangkat pemerintah desa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perangkat pemerintah desa terutama didalam proses pembuatan laporan keuangan anggaran desa agar lebih meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **1.5. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang jauh dari tujuan penelitian maka akan dibatasi masalah yaitu. Penelitian ini menggunakan seluruh desa yang ada didalam kecamatan Wuluhan. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu para perangkat desa yang ada disetiap kantor desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang dilakukan oleh Saragih, dkk (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa di Kabupaten Serang khususnya untuk desa yang ada di Kecamatan Ciruas, Kecamatan Petir dan Kecamatan Tunjung Teja. Menunjukkan hasil bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R square pada penelitian ini adalah sebesar 0,57 atau dapat diartikan bahwa variabel perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa mampu menerangkan 57% terhadap total akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sweetinia, dkk (2019), dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kompetensi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan sistem pengendalian internal dan kualitas penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati, dkk (2019), penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Menunjukkan hasil bahwa secara



parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%.

Penelitian yang dilakukan oleh Martini, dkk (2019), penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, artinya semakin diterapkannya SPIP yang salah satu unsur lingkungan pengendalian maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Penelitian yang dilakukan Puspa, dkk (2020), Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal (SPI), dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 3 variabel yang diduga mempengaruhi akuntabilitas dana desa dikota pariaman yaitu kompetensi, sistem pengendalian internal dan aksesibilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah (2020), penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa yang berada di Kecamatan Temon. Dalam penelitian yang dilakukan pada perangkat desa yang bekerja di kantor desa wilayah Kecamatan Temon, menunjukkan hasil bahwa variabel peran perangkat desa (X1) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan variabel sistem akuntansi keuangan desa (X3) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Arfiansyah (2020), penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengendalian dana desa. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sistem keuangan desa (SIKODES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Febriana (2021), penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, transparansi dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa, kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Erganda, dkk (2021), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa studi pada 13 desa di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, hal ini karena beberapa responden menjawab kurang setuju sehingga dapat disimpulkan transparansi telah terlaksana namun belum maksimal. Sedangkan akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, sehingga akuntabilitas telah berjalan dengan baik. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Herlina, dkk (2021), penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah transparansi, kompetensi, sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi dengan studi kasus di Kecamatan Indragiri Hulu. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penerapan pengendalian intern pemerintah dapat memoderasi pengaruh transparansi dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap pemerintah belum dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berikut merupakan ringkasan mengenai penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini:

**Tabel 2.1**

**Ringkasan Perbedaan dan Persamaan Penelitian**

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Saragih, dkk (2019)	Menunjukkan hasil bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara perangkat desa dan system akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.	Variabel Independen: Sistem akuntansi keuangan desa Variabel dependen: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Variabel independen: Transparansi, kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan. Objek penelitian: Seluruh desa pada Kecamatan Wuluhan.
2	Sweetenia, dkk (2019)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa system pengendalian internal dan kualitas	Variabel independen:  Kompetensi  Variabel dependen:	Variabel independen: Transparansi, aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan desa.

		penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Tempat penelitian
3	Sukmawati, dkk (2019)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%	Variabel Independen: Transparansi  Variable dependen : Pengelolaan keuangan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen: kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan, dan sisitem akunatnsi keuangan desa</li> <li>- Variabel dependen: akuntabilitas</li> <li>- Objek penelitian</li> <li>- Tahun penelitian</li> </ul>
4	Martini, dkk (2019)	Penelitian ini menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, artinya	Variabel dependen : Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen: Sistem pengendalian intern pemerintah</li> <li>- Objek penelitian</li> <li>- Tahun penelitian</li> </ul>

		semakin diterapkannya SPIP yang salah satu unsur lingkungan pengendalian maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.		
5	Puspa, dkk (2020)	Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.	Variabel independen : Kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan  Variabel dependen: Akuntabilitas pengelolaan dana desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen: Transparansi, dan system akuntansi keuangan desa.</li> <li>- Tahun penelitian</li> <li>- Objek penelitian</li> </ul>
6	Musdalifah (2020)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Variabel independen: Aksesibilitas laporan keuangan dan system akuntansi keuangan desa.  Variabel dependen: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen Transparansi dan kompetensi pemerintah desa.</li> <li>- Objek penelitian</li> <li>- Tahun penelitian</li> </ul>

		di kecamatan temon. Sedangkan system akuntansi keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan temon.		
7	Arfiansyah (2020)	Penelitian ini menunjukkan Sistem keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa system pengendalian interen pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Variabel dependen: Akuntabilitas keuangan desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen: sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah</li> <li>- Tahun penelitian</li> <li>- Tempat penelitian</li> </ul>
8	Febriana (2021)	Hasil dari penelitian ini adalah system pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, transparansi, aksesibilitas laporan keuangan	<p>Variabel independen: Transparansi, kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan</p> <p>Variable dependen: Akuntabilitas pengelolaan dana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen: Sistem akuntansi keuangan desa.</li> <li>- Tahun penelitian</li> <li>- Objek penelitian</li> </ul>

		berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	desa	
9	Erganda, dkk (2021)	Penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi telah terlaksana namun belum maksimal, sedangkan akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.	Variabel Independen: Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen : kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan, system akuntansi keuangan desa</li> <li>- Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa</li> <li>- Tahun penelitian</li> <li>- Objek penelitian</li> </ul>
10	Herlina, dkk (2021)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi, dan system akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen: transparansi , kompetensi dan system akuntansi keuangan.</li> <li>- Variabel dependen: Akuntabilitas pengelolaan keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen: aksesibilitas laporan keuangan</li> <li>- Tahun penelitian</li> <li>- Objek penelitian</li> </ul>



		daerah, penerapan system pengendalian intern pemerintah dapat memoderasi pengaruh transparansi dan system akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah belum dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	desa	
--	--	--	------	--

Selain penelitian yang telah disebutkan diatas maka tidak menutup kemungkinan ada penelitian lain tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa. Namun pemilih memilih penelitian tentang Transparansi, Kompetensi Pemerintah Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah ada adalah

dalam penelitian ini peneliti menggunakan Variabel Independen yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan menambahkan variabel sistem akuntansi keuangan desa X4.

## 2.2. Kajian Teori

### 2.2.1. Teori Stewardship

Menurut Prasetyantoko ( 2008 : 84) menyatakan asumsi stewardship memiliki makna bahwa manusia (individu) yang berarti makhluk sosial dimana makhluk sosial pasti memerlukan bantuan oranglain untuk hidup dan saling tolong menolong. Teori stewardship ini juga menjelaskan tentang kepentingan bersama yang merupakan dasar bagi seroang penerima amanah dalam melakukan tindakan. Apabila terdapat perbedaan keperluan antara penerima amanah (*steward*) dengan pemberi amanah (*principal*), maka penerima amanah harus berupaya bekerja sama untuk melakukan tindakannya berdasarkan perilaku pemberi amnah untuk terlaksananya kepentingan umum demi terwujudnya tujuan dari sebuah instansi.

Keterkaitan teori stewardship dengan penelitian ini adalah teori ini menerangkan tentang mengenai keberadaan pemerintah desa (*steward*) pada saat mengerjakan tugas (amanah), tanggung jawabnya dalam mengemban tugas dan juga fungsi dari pemerintah desa bagi masyarakat, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan teguh penuh

kejujuran dan integritas sehingga kesejahteraan masyarakat (*principal*) dapat terjamin.

Dari uraian teori *stewardship* diatas maka dapat disimpulkan bahwa teori ini menggambarkan bentuk kepemimpinan sebuah instansi dimana kepala desa serta aparatur desa sebagai *steward* cenderung melakukan tugasnya berdasarkan atas kemauan pemerintah pusat dimana pemerintah pusat ini berperan sebagai *principal*, yaitu dimana jajaran kepemimpinan instansi ini memiliki kewajiban untuk menerbitkan laporan atau informasi terkait dengan pengelolaan dana desa yang memiliki sifat terbuka, integritas, dan menyajikan laporan keuangan menggunakan sarana teknologi sehingga mudah diakses oleh beberapa pihak terkait yang menggunakan laporan keuangan tersebut, menurut asumsi warga yang berperan sebagai *principal* memiliki hak untuk mengetahui informasi terkait pengelolaan dana desa tersebut.

### **2.2.2. Pemerintah Desa**

Pemerintah desa merupakan penyelenggara semua urusan pemerintahan yang dilakukan pemerintah desa beserta badan permusyawaratan desa dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Menurut Muallifu (2019) mengatakan bahwa pemerintah desa memiliki arti sebagai

lembaga pemerintahan yang berkewajiban untuk mengelola daerah di tingkat desa, dimana dalam pemerintahan desa mencakup pemerintah desa juga badan permusyawaratan desa.

Pemerintah desa merupakan aspek penyelenggaraan pemerintahan di desa, sehingga pemerintah desa memiliki tugas utama yang harus dilaksanakan yaitu:

- menjalankan segala keperluan rumah tangga desa serta keperluan yang diperlukan pemerintahan secara umum.
- Menjalankan berbagai tugas pembantuan yang ditetapkan pemerintah baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.
- Membangun serta membina masyarakat desa.

Pemerintah desa terdiri dari aparatur yang memiliki tugas dan wewenang yang dimiliki oleh setiap aparatur, tugas yang dimiliki oleh setiap aparatur menurut Sujarweni (2015: 90) yaitu sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala desa merupakan tingkat tertinggi dari sebuah instansi pemerintahan, sehingga tugas yang dimiliki juga sangat besar. Tugas dari kepala desa adalah melakukan pembangunan untuk desa, membina warga desa, menjalankan pemerintahan desa yang telah disusun, dan melakukan upaya pemberdayaan warga desa.

b. Sekertaris Desa

Sekertaris desa memiliki tugas yaitu membantu kepala desa dalam melakukan segala sesuatu tentang pengelolaan administrasi desa juga membantu menyiapkan bahan untuk pembuatan laporan pelaksanaan pemerintah desa.

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan salah satu badan yang menjalankan fungsi pemerintahan dimana anggotanya terdiri dari wakil penduduk desa berdasarkan wilayah yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi dari BPD adalah bersama kepala desa melakukan pembahasan dan menyepakati rancangan peraturan desa yang telah ditentukan, melakukan pemantauan terhadap kinerja kepala desa, menyediakan wadah untuk menampung aspirasi dari warga desa sehingga mampu menyalurkan aspirasi tersebut ke pada kepala desa sehingga dapat ditindak lanjuti.

d. Pelaksana Teknik Desa

Pelaksana tehnik desa terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- Kepala urusan pemerintahan (KAUR PEM) memiliki tugas untuk membantu kepala desa dalam melakukan setiap pengelolaan administrasi mulai dari administrasi kependudukan, pembinaan ketertiban, pertahanan dan keamanan masyarakat serta membantu menyiapkan materi untuk perumusan kebijaksanaan dalam penataan menyusun hukum desa.

- Kepala urusan pembangunan (KAUR Pembangunan) memiliki tugas mempersiapkan strategi terkait teknis pembangunan mulai dari pembangunan ekonomi warga, potensi yang dimiliki desa, dan mengelola administrasi pembangunan serta mengelola pelayanan masyarakat.
- Kepala urusan kesejahteraan rakyat (KAUR KESRA) memiliki tugas dalam mempersiapkan rumusan teknik penyusunan program terkait agama serta melakukan program untuk memberdayakan potensi masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- Kepala urusan keuangan desa (KAUR KEU) memiliki tugas yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber penerimaan yang ada di desa, membantu pengelolaan administrasi keuangan yang ada di desa, melakukan persiapan materi untuk menyusun APBDes mendatang serta laporan keuangan yang diperlukan untuk tanggung jawab pengelolaan keuangan oleh desa.
- Kepala urusan umum (KAUR Umum) memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa dalam melakukan tata usaha, administrasi umum, mengelola kearsipan inventaris asset desa serta menyiapkan materi untuk rapat juga laporan yang dibutuhkan.

Berdasarkan uraian diatas tentang wewenang serta tugas dari setiap perangkat desa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa dituntut dengan berbagai peraturan yang berlaku untuk mampu mengelola dengan baik segala sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan. Pengelolaan sumberdaya tersebut diharapkan mampu sesuai dengan asas pemerintahan yang mencakup bersih, baik, transparan dan juga akuntabel.

### **2.2.3. Transparansi**

Menurut Mardiasmo (2009:15) Transparansi mengacu pada kebebasan dalam mendapatkan informasi terkait dengan kepentingan khalayak umum yang secara langsung bisa diperoleh bagi yang memiliki kepentingan. Transparansi adalah keterbukaan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam menyampaikan informasi yang memiliki hubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public untuk berbagai pihak terutama bagi yang memerlukan informasi tersebut. Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah salah satu hal yang wajib dilakukan karena hal ini mampu menimbulkan dampak positif bagi pemerintah sehingga transparansi ini seharusnya mendapatkan respon yang positif dari pemerintah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi menjadi hal utama dalam penyelenggaraan berbagai fungsi pemerintahan untuk melaksanakan seluruh amanah dari masyarakat. Pemerintah memiliki

wewenang dalam pengambilan keputusan yang nantinya memiliki dampak kepada masyarakat, sehingga masyarakat menuntut pemerintah untuk mengungkapkan informasi yang nyata terkait hal yang telah dilaksanakan, dengan adanya transparansi kecurangan sulit untuk disembunyikan. Maka dari itu transparansi seharusnya dijadikan bagian penting karena dapat melindungi uang rakyat dari tindakan korupsi.

### **2.2.3.1. Dimensi Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang disembunyikan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009:19) adalah sebagai berikut:

#### **1. Informatif (Informative)**

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

Indikator dari dimensi Informatif adalah:

- a. Jelas, akurat dan tepat waktu
- b. Mudah diakses
- c. Memadai
- d. Dapat diperbandingkan

#### **2. Pengungkapan (Disclosure)**



Dimensi transparansi yang kedua yaitu pengungkapan, pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktifitas dan kinerja finansial yang telah dilakukan sebelumnya.

Indikator dari dimensi pengungkapan adalah:

- a. Kondisi keuangan
  - b. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan
  - c. Susunan pengurus
3. Keterbukaan (Openness)

Dimensi transparansi yang ketiga yaitu keterbukaan, keterbukaan kepada masyarakat atau public atas aktifitas dari kinerja finansial yang telah dilakukan.

Indikator dalam dimensi keterbukaan adalah:

- a. Setiap informasi publik harus bersifat terbuka
- b. Setiap informasi publik harus mudah diakses

#### **2.2.4. Kompetensi Pemerintah Desa**

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki setiap individu dalam menyelesaikan seluruh tugasnya, kompetensi dari setiap individu mencakup pengetahuan, sikap atau tingkah laku, dan keterampilan. Definisi lain dari kompetensi menurut Robbins (2007) adalah kemampuan ataupun potensi personal untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya, dimana kemampuan tersebut dipengaruhi dua aspek yaitu kemampuan fisik dan kemampuan intelektual.

Menurut Moehariono (2018) memiliki tiga varian kompetensi yang dipunyai dalam sumber daya manusia yaitu:

- a. Kompetensi personal yaitu keahlian yang dimiliki individu dalam melakukan pekerjaan yang mampu menggabungkan antara kemampuan, pengetahuan dan tingkah laku yang berdasarkan dari pengalaman serta edukasi yang dimiliki, agar selama proses pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara profesional efektif dan efisien. Kompetensi personal atau kompetensi yang dimiliki setiap individu terbagi menjadi dua yaitu:
  - Yang pertama adalah kompetensi dasar (threshold), kompetensi dasar ini merupakan kompetensi yang wajib ada pada diri setiap individu seperti kemampuan dalam membaca dan menulis
  - Yang kedua yaitu kompetensi differentiating (keterampilan) kompetensi ini bertujuan untuk memilah antara kemampuan setiap individu satu dengan individu lainnya yang memiliki kinerja yang tinggi dan juga kinerja yang rendah
- b. Kompetensi jabatan yaitu kompetensi terpenting yang harus dimiliki seorang individu yang bekerja, seorang pekerja agar mampu mencapai tingkat kinerja yang bagus dan optimal hendaknya harus memiliki keseimbangan antara kompetensi personal yang dimiliki dengan kompetensi jabatan yang sedang dimban. Jika kedua komponen tersebut memiliki keseimbangan yang baik maka akan terjadi

keselarasan dengan keterampilan yang dimiliki oleh individu tersebut. Sehingga mampu mencapai tingkat kinerja yang bagus serta optimal.

- c. Kompetensi organisasi merupakan kompetensi yang memiliki pengaruh penting dalam berhasil atau tidaknya dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Faktor utama dalam kompetensi organisasi ini adalah sumber daya manusia, sehingga untuk mencapai tujuan organisasi memerlukan rasa kepercayaan dari setiap individu yang terdapat dalam organisasi tersebut. Dengan adanya rasa saling percaya diantara setiap anggota organisasi tersebut maka akan menumbuhkan motivasi pada diri masing-masing anggota untuk mencapai tujuan dari organisasi.

#### **2.2.4.1. Dimensi Kompetensi Pemerintah Desa**

Menurut Edison et al (2016) dimensi kompetensi pemerintah desa adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan adalah kemampuan berpikir atau sebuah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang.

Indikator dimensi pengetahuan adalah:

- a. Pengetahuan
  - b. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan
2. Kemampuan (*Skill*)

Dimensi kompetensi pemerintah desa selanjutnya adalah kemampuan, dimana kemampuan yang dimiliki oleh seseorang mampu menunjang pekerjaannya.

Indikator dari dimensi kemampuan adalah:

- a. Keahlian teknis
  - b. Kemampuan mencari solusi
3. Sikap (*Attitude*)

Dimensi ketiga dari kompetensi pemerintah desa adalah sikap.

Sikap adalah bentuk

Indikator dimensi sikap adalah:

- a. Inisiatif dalam bekerja
- b. Keramahan dan kesopanan

#### **2.2.5. Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan yang diberikan dari beberapa pihak (pemerintah) kepada pengguna laporan keuangan untuk mendapatkan informasi tentang keuangan daerah (Sari, 2017). Akuntabilitas dapat berjalan dengan baik apabila aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan informasi laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dapat dibaca dan dipahami dengan mudah. Kemudahan dalam mengakses informasi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, akses bisa didapatkan melalui berbagai media seperti internet, majalah atau koran, radio serta televisi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan yang diberikan oleh suatu pihak (pemerintah desa) kepada masyarakat umum terkait laporan keuangan

sebagai bentuk pertanggungjawaban suatu pihak (pemerintah desa). Akses yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk memudahkan masyarakat umum dalam melihat informasi mengenai kinerja pemerintah desa sehingga dapat digunakan masyarakat sebagaimana mestinya.

#### **2.2.5.1. Dimensi Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Menurut Nurmutmainah (2015) dimensi dalam variabel aksesibilitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

##### **1. Keterbukaan**

Keterbukaan dapat diartikan sebagai setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi yang diinginkan

Indikator dalam dimensi keterbukaan adalah:

- a. Terbuka di media masa

##### **2. Kemudahan**

Kemudahan dapat diartikan sebagai setiap penerima pelayanan memiliki akses mudah dalam mendapatkan informasi yang diinginkan

Indikator dalam dimensi kemudahan adalah:

- a. Mudah diakses

##### **3. Ketersediaan**

Ketersediaan dapat diartikan bahwa informasi yang diinginkan oleh penerima pelayanan telah tersedia.

Indikator dalam dimensi ketersediaan adalah:

- a. Ketersediaan Informasi

### **2.2.6. Sistem Akuntansi Keuangan Desa**

Sistem akuntansi keuangan desa merupakan sebuah proses pencatatan dari setiap transaksi yang terjadi di desa, dan kemudian dari setiap transaksi tersebut dibuktikan dengan adanya nota-nota yang dijadikan sebagai sumber data, dari sumber data tersebut kemudian dapat diolah dan dilakukan pencatatan serta pelaporan keuangan. Sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan desa.

#### **2.2.6.1. Dimensi Sistem Akuntansi Keuangan Desa**

Menurut Mahmudi (2010:22) menyatakan dimensi sistem akuntansi keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi Penerimaan kas

Merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi yang dibuat untuk mengelola kegiatan penerimaan uang mulai dari penjualan sampai dengan penagihan piutang.

Indikator dalam akuntansi penerimaan kas adalah:

- a. Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas

2. Akuntansi Pengeluaran Kas

Indikator dalam dimensi akuntansi pengeluaran kas adalah sebagai berikut:

- a. Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas

### 3. Akuntansi Aset

Indikator dalam dimensi akuntansi aset adalah:

- a. Sistem dan prosedur akuntansi aset

### 4. Akuntansi Selain Kas

Indikator dalam akuntansi selain kas adalah sebagai berikut:

- a. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas.

#### **2.2.7. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Mardiasmo (2009 : 20) Akuntabilitas public merupakan salah satu kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk menyajikan, pertanggungjawaban dan memaparkan seluruh kegiatan yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh pihak pemberi amanah yang memiliki hak serta wewenang untuk mendapatkan laporan pertanggungjawaban dari tugas yang telah diberikan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan semua aktivitas yang mencakup perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pelaporan. Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada berbagai aspek yaitu akuntabel, transparan, serta partisipatif yang dijalankan secara tertit dan disiplin terhadap anggaran. Akuntabilitas dapat tercapai melalui beberapa tahapan, tahapan dari akuntabilitas tersebut terdiri dari:

### 1. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan ini merupakan tahapan yang paling penting karena pada tahapan ini terdapat proses perumusan aktivitas serta penganggaran yang ditetapkan. Dalam penetapan penganggaran ini terdapat beberapa pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yaitu seperti kades, BPD, sekdes dan jajaaran lainnya. Sehingga dapat terlihat bahwa akuntabilitas dimulai dari tahapan perencanaan ini.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini kepala desa yang memiliki tanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa mendapatkan bantuan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yaitu seperti sekretaris desa, bendahara, serta kepala seksi. Dimana pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa mengetahui hal-hal yang harus dijaga seperti akuntabel, tertib, transparan, dan disiplin anggaran. Sehingga pelaksanaan dari setiap perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya berjalan dengan baik dan efisien.

### 3. Tahap Penatausahaan

Dalam tahap ini merupakan tugas dari seorang bendahara desa, dimana penatausahaan keuangan desa ini mencakup seluruh kegiatan pendataan terkait pemasukan maupun pengeluaran,



penutupan buku dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulannya yang dibutuhkan kepala desa. Bendahara desa sebagai pelaku penatausahaan keuangan desa memakai sarana dalam penatausahaan pemasukan maupun pengeluaran yaitu buku kas umum, buku kas pembantu pajak serta buku bank.

#### 4. Tahap Pelaporan

Dalam tahap pelaporan ini kepala desa dalam melaksanakan pekerjaan serta wewenangnya memiliki kewajiban yakni melaporkan segala bentuk kegiatan pemerintah desa pada bupati atau walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

#### 5. Tahap Pertanggungjawaban

Akuntabel merupakan bagian yang wajib dijadikan sebagai acuan bagi kepala desa dalam mengelolan keuangan desa. Hal tersebut dimaksudkan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan anggaran desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Dapat dikatakan jika laporan pertanggungjawaban yang menyangkut realisasi penyelenggaraan APBDesa ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari laporan pelaksanaan pemerintahan desa.

##### **2.2.7.1 Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Mahmudi (2013:9) terdapat beberapa dimensi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu:

### 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya.

Indikator dalam dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum adalah:

- a. Penghindaran Penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi
- b. Menaati ketentuan hukum yang berlaku

### 2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial ini sering disebut sebagai akuntabilitas kinerja yaitu pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien.

Indikator dalam akuntabilitas manajerial adalah:

- a. Pengelolaan organisasi secara efektif dan efisiensi

### 3. Akuntabilitas Program

Terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak.

Indikator dalam akuntabilitas program adalah:

- a. Pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi
- b. Strategi

### 4. Akuntabilitas Kebijakan

Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Indikator dalam akuntabilitas kebijakan adalah:

- a. Pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil

#### 5. Akuntabilitas Finansial

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dalam menggunakan dana public secara efektif, ekonomi dan efisien, terhindar dari kebocoran dan pemborosan dana serta korupsi.

Indikator dalam akuntabilitas finansial adalah:

- a. Efektif, efisien dan ekonomis
- b. Membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi

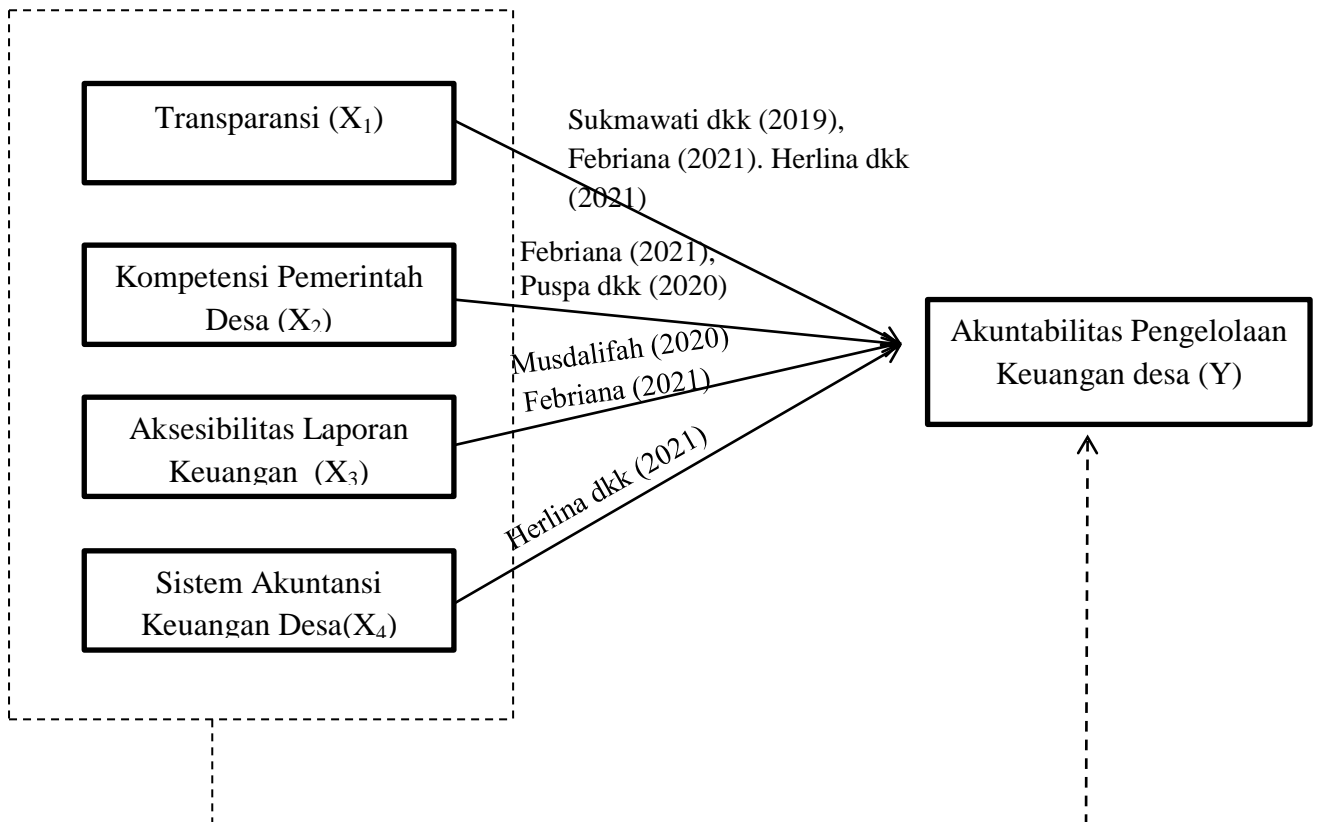
### **2.3. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual yaitu inti dari sebuah teori yang sudah dikembangkan serta dapat mendasari dalam perumusan hipotesis. Pada hakikatnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan merupakan tingkat keberhasilan bagi sebuah instansi pemerintahan dalam mengelola APBD pada setiap tahunnya.

Berikut ini digambarkan kerangka konseptual yang berfungsi sebagai acuan sekaligus mencerminkan pola pikir yang digunakan dalam perumusan

dan penyusunan hipotesis. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Kerangka Konseptual



**Gambar 1.1**

#### Keterangan :

—————→ = Uji secara parsial

-----→ = Uji secara simultan

Kerangka konseptual diatas menggambarkan adanya hubungan variabel baik secara simultan maupun secara parsial. Garis lurus menggambarkan bahwa variabel Transparansi ( $X_1$ ), kompetensi pemerintah desa ( $X_2$ ), aksesibilitas laporan keuangan ( $X_3$ ), sistem akuntansi keuangan

desa (X4) berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sedangkan garis putus-putus menggambarkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### **2.4. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.**

Transparansi merupakan penyedia informasi yang mudah diterima oleh masyarakat, dimana masyarakat sebagai yang membutuhkan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, transparansi dapat dikatakan tercapai apabila pada penyelenggaraannya telah memenuhi syarat prinsip good governance yang mencakup keterbukaan informasi, laporan pertanggungjawaban serta rasa keadilan, pemenuhan prinsip good governance ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Maka dari itu dalam setiap instansi pemerintahan diwajibkan melaksanakan prinsip transparansi untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (Fauzani, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Herlina dkk (2021) menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

### **Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Kompetensi merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap individu yang mencakup pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan juga sikap atau tingkah laku (*attitude*), untuk mendorong keberhasilan pembangunan pada desa secara maksimal (Sweetenia, 2019). Pernagkat desa yang memiliki kemampuan yang memadai lebih mendorong keberhasilan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebaliknya jika kompetensi yang dimiliki setiap individu pemerintahan desa cenderung tidak memadai maka keberhasilan dalam pengelolaan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga kurang maksimal dalam penerapannya. Hipotesis ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya yaitu Herlina dkk (2021), Febriana (2021), Pupsa dkk (2020). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan ditulis dalam penelitian ini adalah:

H2: Kompetensi pemerintah desa berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

### **Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.**

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan yang diberikan pemerintah daerah yang terkait akses laporan keuangan kepada masyarakat juga bagi individu yang berkepentingan guna mengambil data yang telah disediakan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya fungsinya. Secara umum aksesibilitas yang baik ditentukan pada kemudahan akses masyarakat terhadap laporan pertanggungjawaban serta pelaporan yang mudah bisa dibaca dan dipahami oleh pihak yang memiliki kepentingan. Menurut Musdalifah (2020) di dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hipotesis ini juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Febriana (2021). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan ditulis dalam penelitian ini adalah :

H3: Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

### **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.**

Sistem akuntansi keuangan desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Saragih, 2018). Maka semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan yang ada di desa maka akan semakin baik pula dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Sedangkan menurut Putri (2018) berdasarkan analisis regresi berganda

yang telah dilakukan menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat ditulis dalam penelitian ini adalah:

H4: Sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

**Pengaruh Transparansi, Kompetensi Pemerintah Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.**

H5: Transparansi, kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Gambaran Singkat Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Kecamatan Wuluhan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Jember, tepatnya berada pada Jember Selatan. Kecamatan Wuluhan terdiri dari 7 desa yaitu terdiri dari desa Kesilir, desa Tanjungrejo, desa Dukuhdempok, desa Ampel, desa Lojejer, desa Tamansari, dan desa Glundengan, dimana batas dari Kecamatan Wuluhan pada bagian timur adalah desa Kesilir, pada bagian barat adalah desa Tamansari, bagian selatan adalah desa Lojejer, dan pada bagian utara adalah desa Glundengan.

#### **3.2. Populasi dan Sampel Penelitian**

##### **3.2.1. Populasi**

Populasi menurut Widagdo dkk, (2021:27) adalah keseluruhan satuan yang karakteristiknya akan diteliti. Di dalam penelitian ini, populasi yang diambil yaitu perangkat desa pada 7 Desa yang berada di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, dengan jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 12 di setiap desa, sehingga dapat dijumlahkan bahwa seluruh jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 84.

### 3.2.2. Sampel

Sampel menurut Widagdo dkk, (2021:36) adalah bagian dari populasi yang suaranya diambil sebagai data survey. Penentuan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*, dimana *purposive sampling* adalah tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penggunaan tehnik *purposive sampling* ini dengan maksud tidak semua dari bagian populasi dapat dijadikan sampel karena tidak sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini. Kriteria dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Populasi penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang ada di setiap Desa di Kecamatan Wuluhan
2. Perangkat desa yang dijadikan sampel adalah bagian top manajemen dan middle manajemen dalam struktur organisasi.
3. Bagian top manajemen dalam penelitian ini adalah kepala desa
4. Bagian middle manajemen dalam penelitian ini adalah Sekertaris Desa, Kaur TU & Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan.

Dari uraian kriterian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 perangkat desa.

### 3.3. Jenis Penelitian

, analisi datanya bersifat statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ada (Sugiyono, 2013:67). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana data primer adalah data yang diperoleh dari

sumber yang pertama dan langsung diolah oleh peneliti (Widagdo dkk, 2021:29).

### **3.4. Identifikasi Variabel**

Variabel penelitian adalah suatu atau sifat atau nilai dari orang, objek, ataupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Variabel independen atau bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi baik penyebab perubahannya maupun terjadinya variabel terikat. (Sugiyono,2013). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Transparansi (X1), Kompetensi Pemerintah Desa (X2), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3) dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X4).
2. Variabel dependen atau terikat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. (Sugiyono,2013). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

### **3.5. Definisi Operasional Variabel**

#### **1. Variabel Bebas**

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2017:80).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah sehingga publik dapat dengan mudah mengetahui rencana keuangan pemerintah selama satu tahun kedepan. Variabel transparansi dapat diukur dengan menggunakan indikator menurut Mardiasmo (2009:19) yaitu sebagai berikut:

1. Informatif
    - a. Jelas, akurat dan tepat waktu
    - b. Mudah diakses
    - c. Memadai
    - d. Dapat diperbandingkan
  2. Pengungkapan
    - a. Kondisi keuangan
    - b. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan
    - c. Susunan pengurus
  3. Keterbukaan
    - a. Setiap informasi publik harus bersifat terbuka
    - b. Setiap informasi publik harus mudah diakses
- b. Kompetensi Pemerintah Desa

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh setiap individu. Kompetensi pemerintah desa dapat diukur dengan indikator menurut Edison et al (2016) yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan
  - a. Pengetahuan
  - b. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan
2. Kemampuan
  - a. Keahlian teknis
  - b. Kemampuan mencari solusi
3. Sikap
  - a. Inisiatif dalam bekerja
  - b. Keramahan dan kesopanan
  - c. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas dapat diartikan sebagai kemudahan individu atau kelompok untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Aksesibilitas laporan keuangan ini dapat diukur dengan indikator menurut Nurmuthmainnah (2015) adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan
  - a. Terbuka dimedia masa
2. Kemudahan
  - a. Mudah diakses
3. Ketersediaan
  - a. Ketersediaan informasi
- d. Sistem Akuntansi Keuangan Desa

Sistem akuntansi keuangan adalah serangkaian prosedur yang dijalankan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan. Variabel ini dapat diukur melalui indikator menurut Mahmudi (2010:22) yaitu sebagai berikut:

1. Akuntansi penerimaan kas
  - a. Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas
2. Akuntansi pengeluaran kas
  - a. Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas
3. Akuntansi aset
  - a. Sistem dan prosedur akuntansi aset
4. Akuntansi selain kas
  - a. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas.

## **2. Variabel Terikat**

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah sebuah proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan juga DPRD. Indikator dalam variabel ini menurut Mahmudi (2013:9) yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
  - a. Penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi
  - b. Menaati ketentuan hukum yang berlaku
2. Akuntabilitas manajerial
  - a. Pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien
3. Akuntabilitas program
  - a. Pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi
  - b. Strategi
4. Akuntabilitas kebijakan
  - a. Pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil
5. Akuntabilitas finansial
  - a. Efektif, efisien dan ekonomis
  - b. Membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi

### **3.6. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara peneliti dalam memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan sesuai dengan kegunaan dan juga tujuan tertentu dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini metode

pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner merupakan sejumlah daftar pertanyaan tertulis yang sebelumnya sudah dirumuskan, yang kemudian responden dapat menjawab. Secara umum kuisioner disusun guna mengumpulkan banyak data kuantitatif dan bisa diserahkan secara pribadi untuk responden.

Kuisioner yang dipakai pada penelitian ini adalah kuisioner dengan memakai skala *likert*. Skala *Likert* adalah skala yang tersusun atas lima tingkat jawaban diantaranya :

SS : Sangat Setuju (5)

S : Setuju (4)

N : Netral (3)

TS : Tidak Setuju (2)

STS: Sangat Tidak Setuju (1)

### 3.7. Uji Instrumen

Uji instrument adalah uji yang menjadi syarat dalam penelitian yang menggunakan instrument kuisioner dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

#### 3.7.1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013:49), uji validitas data menggunakan *person correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaa dengan total skor. Jika hubungan antara skor memiliki tingkat keterkaitan dibawah 0,05 maka butir pertanyaa tersebut dinyatakan valid.



### 3.7.2. Uji Reabilitas

Menurut Ghozali (2006;35), uji reabilitas data merupakan pengujian untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Reabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relative tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subjek yang sama. Suatu kuisioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan atau pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai *crounbach alpha* > 0.60.

## 3.8. Uji Asumsi Klasik

### 3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini memakai uji normalitas *Kolmogorov smirnov* untuk mengambil keputusan dengan memiliki pertimbangan yaitu apabila nilai signifikan > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas dapat terpenuhi, namun apabila nilai signifikansi < 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal.

### 3.8.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antara satu variabel bebas dengan variabel lainnya.

Model regresi dapat dikatakan baik apabila terdapat korelasi antara variabel bebas atau variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai  $VIF < 10$  menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

### 3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu uji model regresi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2018). Jika antara penelitian satu dengan penelitian lainnya memperlihatkan *variance* residual stabil maka dikenal homoskedastisitas, sedangkan jika hasilnya berbeda maka dikenal sebagai heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui terjadinya heteroskedastisitas atau tidak adalah dengan melalui grafik plot pada rentang nilai dengan variabel terikat atau variabel dependen yaitu ZPRED serta residualnya SRESID. Adapun landasan analisis yang digunakan adalah :

- (1) Apabila terdapat bentuk tertentu seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur baik melebar, bergelombang, maupun menyempit maka dapat diidentifikasi bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.

- (2) Apabila titik-titik tidak menggambarkan pola yang jelas, dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat diidentifikasi bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.9 Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki keterkaitan positif maupun negative terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Trnasparansi, Kompetensi pemerintah desa, Aksesibilitas Laporan Keuangn dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Berikut ini merupakan persamaan regresi berganda yaitu:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4 + e$$

Keterangan :

Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

X<sub>1</sub> : Tarnsparansi

X<sub>2</sub> : Kompetensi Pemerintah Desa

X<sub>3</sub> : Aksesibilitas Laporan Keuangan

X<sub>4</sub> : Sistem Akuntansi Keuangan Desa

a : Konstanta

b<sub>1</sub>-b<sub>2</sub> : Koefisien regresi variabel X

e : Standar error (tingkat kesalahan yang masih bisa ditolerir)

### 3.10. Uji Hipotesis

#### 3.10.1 Uji T atau Parsial

Menurut Ghozali (2013:57) uji T ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara satu variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Uji statistis t dapat dilakukan dengan membedakan anatar skor t-tabel dan t-hitung. Jika nilai profitability  $t > 0,05$  maka hipotesis ditolak dengan artian bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Sedangkan jika nilai profitability  $t < 0.05$  maka dipotesis diterima atau dapat diartikan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat.

### **3.10.2. Uji F atau Simultan**

Uji F ini digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Untuk mengetahui variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen dapat menggunakan tingkat signifikan 0,05, apabila nilai signifikan  $> 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa hipotesis ditolak atau variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima dan dapat diartikan jika variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

### **3.11 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menunjukkan sejauh mana kombinasi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1 jika semakin tinggi nilai  $R^2$  dari model regresi maka hasil regresi semakin baik. Nilai  $R^2$  mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependennya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Kecamatan Wuluhan**

Kecamatan Wuluhan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jember, Kecamatan Wuluhan memiliki luas wilayah sebanyak 128.74 km<sup>2</sup>, wilayah tersebut dibagi menjadi beberapa yaitu pertanian, perumahan atau pemukiman, pendidikan dan juga pemerintahan.

Wilayah Kecamatan Wuluhan bagian barat dibatasi langsung oleh sungai bedadung yang bermuara di Puger atau pantai Pancer, kecamatan Wuluhan juga dibatasi dengan pantai yang berada di wilayah selatan dan juga berdampingan dengan gunung, yaitu gunung Watangan. Di ujung timur gunung watangan terdapat tempat wisata pantai dan hutan yang dikelola oleh perum Perhutani yang biasa disebut Tanjung Papuma. Dibagian ujung barat yang merupakan muara yang memiliki fungsi tempat menepinya perahu-perahu nelayan, dan juga terdapat hutan selain itu terdapat pemadian alam yang biasa disebut kucur.

Penduduk yang tercatat di Kecamatan Wuluhan yaitu berjumlah 123.999 jiwa yang terdiri atas 63.107 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 60.892 jiwa berjenis kelamin perempuan. Desa Lojejer merupakan wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk paling banyak yaitu dengan total penduduk 20.554 jiwa, sedangkan desa

Glundengan memiliki kepadatan penduduk paling sedikit dikecamatan Wuluhan yaitu dengan total penduduk sebanyak 15.656 jiwa.

Fasilitas pendidikan di kecamatan Wuluhan relative lengkap, sejumlah sekolah dan madrasah berdiri serta tersebar di wilayah kecamatan Wuluhan. Pada kecamatan Wuluhan selain terdapat pendidikan negeri terdapat juga sejumlah pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta. Kecamatan Wuluhan terdapat 7 desa dan 1 kelurahan dimana desa ini meliputi Kesilir, Tanjungrejo, Dukuhdempok, Ampel, Lojejer, Tamansari, dan Glundengan. Kecamatan Wuluhan terbagi menjadi 130 RW (rukun warga) dan 717 RT (rukun tetangga) dan 25 dusun.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner yang disebar kepada perangkat desa, jumlah kuisisioner yang disebar sebanyak 56 kuisisioner dengan jumlah responden sebanyak 56 perangkat desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Sampel Penelitian**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah seluruh perangkat desa	84 orang
Kriteria 1: Bagian Top manajemen (Kepala Desa)	7 orang
Kriteria 2: Bagian Middle manajemen (Sekertaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur TU & Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan )	49 orang
Kuisisioner tidak kembali	0
Jumlah sampel terpilih	56 orang

#### **4.1.1. Identifikasi Responden**

Berdasarkan kuisioner yang disebarakan kepada 56 perangkat desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Hasil penelitian dari 56 responden perangkat desa pada setiap desa yang terletak pada Kecamatan Wuluhan diperoleh data sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

**Tabel 4.2**  
**Identifikasi Respponden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	46	82,1%
2.	Perempuan	10	17,9%
<b>Total</b>		56	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2022

Dari table 4.2 diatas memperlihatkan 56 responden yaitu seluruh perangkat desa yang ada di Kecamatan Wuluhan dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 46 orang (82,1%) dan perempuan berjumlah 15 orang (17,9%). Hasil data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki dengan proporsi 82,1% lebih besar dibandingkan dengan responden berjenis kelamin perempuan.

2. Umur Responden

**Tabel 4.3**  
**Identifikasi Respoden Berdasarkan Umur Responden**

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	21-30 Tahun	8	14,4%
2	31-40 Tahun	7	12,6%
3	41-50 Tahun	20	35,8%
4	>51 Tahun	21	37,4%
<b>Total</b>		56	100%

**Sumber:** data primer yang diolah, 2022



Dari table 4.3 diatas dapat dilihat bahwa 56 responden perangkat desa pada Kecamatan Wuluhan sesuai dengan perolehan data yang berumur 21-30 tahun terdapat 8 orang (14,4%), yang berumur 31-40 tahun terdapat 7 orang (12,6%), yang berumur 41-50 tahun terdapat 20 orang (37,4%), dan responden yang memiliki umur lebih dari 51 tahun terdapat 21 orang (37,4%). Maka dengan itu minoritas responden terdapat pada kisaran umur 31-40 tahun dengan total 7 orang, dan mayoritas umur responden terdapat pada rentang umur > 50 tahun dengan berjumlah 21 orang.

### 3. Pendidikan Terakhir

**Tabel 4.4**  
**Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	34	60,7%
4	S1	17	30,4%
5	D1	2	3,6%
6	Lain-lain	3	5,4%
<b>Total</b>		56	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan responden dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan SMA yaitu sebanyak 34 orang (60,7%), pendidikan S1 sebanyak 17 orang (30,4%), pendidikan D1 sebanyak 2 orang (3,6%), dan pendidikan lain-lain sebanyak 3 orang (5,4%), serta dari tabel

diatas menunjukkan bahwa tidak ada perangkat desa yang memiliki pendidikan terakhir di jenjang SMP maupun SD.

#### 4. Jumlah Responden Dalam Penelitian

Responden dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur TU & Umum, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan. Jumlah masing-masing responden pada tabel berikut:

**4.5**  
**Responden Terkait Penelitian**

<b>No</b>	<b>Responden</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kepala Desa	7
2	Sekertaris Desa	7
3	Kaur Keuangan	7
4	Kaur Perencanaan	7
5	Kaur TU & Umum	7
6	Kasi Pelayanan	7
7	Kasi Pemerintahan	7
8	Kasi Kesejahteraan	7
	<b>Total</b>	<b>56</b>

Tabel 4.4 menjelaskan tentang data responden untuk penyebaran kuisisioner dimana penyebaran kuisisioner dilakukan pada setiao desa yang ada di Kecamatan Wuluhan.

#### 4.1.2. Gambaran Umum Tanggapan Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 56 orang yang terdiri dari Kepala Desa, serta perangkat desa pada setiap desa di Kecamatan Wuluhan. Setiap pernyataan dari hasil penyebaran

kuisisioner penelitian ini akan dinilai atau mendapatkan skor dengan menggunakan Skala *Likert*.

Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *Likert* maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik ukur untuk menyusun sebuah pernyataan atau pertanyaan. Jawaban dari setiap instrument yang menggunakan skala *Likert* mempunyai gradasi dari segi positif sampai negatif (Sugiyono, 2013).

Skala *Likert* menggunakan perhitungan yaitu Sangat Setuju (SS) memiliki skor 5, Setuju (S) memiliki skor 4, Netral (N) memiliki skor 3, Tidan Setuju (TS) memiliki skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1.

#### **1.1.2.1 Variabel Transparansi (X1)**

Berdasarkan hasil tabulasi data tanggapan responden terhadap pernyataan mengenai Transparansi terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Wuluhan maka dapat dilihat tabulasi jumlah jawaban seluurh responden, yaitu:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Tanggapan Responden Variabel Transparansi (X1)**

No	pernyataan	Keterangan					Total	Rata-rata
		5 (SS)	4 (S)	3 (N)	2 (TS)	1 (STS)		
1	Saya memberikan informasi secara jelas, akurat dan tepat waktu	29	25	2	0	0	251	2,51
2	Saya menyajikan informasi yang mudah di akses	27	29	0	0	0	251	2,51
3	Saya menyajikan informasi yang memadai	23	33	0	0	0	247	2,47
4	Saya menyajikan informasi yang dapat dibandingkan	22	30	3	0	1	240	2,4
5	Saya menyajikan informasi sesuai dengan kondisi keuangan	22	33	1	0	0	245	2,45
6	Saya menyajikan informasi sesuai dengan bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan	23	32	1	0	0	243	2,43
7	Saya menyajikan informasi sesuai dengan susunan pengurus	24	31	0	1	0	246	2,46
8	Saya menyajikan terkait informasi publik yang bersifat terbuka	24	32	0	0	0	248	2,48
9	Saya menyajikan terkait informasi publik yang bersifat mudah diakses	13	43	0	0	0	237	2,37
<b>Jumlah</b>							<b>20208</b>	<b>22,08</b>

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat rata-rata dari setiap indikator variabel Transparansi (X1), berdasarkan dari jawaban

responden kesembilan indikator dari variabel Transparansi dinyatakan baik, namun indikator yang paling mendukung transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada indikator pertama dan kedua.

#### 4.1.2.2. Variabel Kompetensi Pemerintah Desa (X2)

Berdasarkan hasil tabulasi data tanggapan responden terhadap pernyataan mengenai Kompetensi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Wuluhan dapat dilihat tabulasi jumlah jawaban seluruh responden, yaitu:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Tanggapan Responden Variabel Kompetensi**  
**Pemerintah Desa**

No	Pernyataan	Keterangan					Total	Rata-rata
		5 (SS)	4 (S)	3 (N)	2 (TS)	1 (STS)		
1	Saya sebagai perangkat desa memiliki pengetahuan yang mumpuni terhadap pekerjaan yang dilakukan	13	43	0	0	0	237	2,37
2	Saya sebagai perangkat desa memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan yang dimiliki	18	35	3	0	0	239	2,39
No	Pernyataan	Keterangan					Jumlah	Total
		5 (SS)	4 (S)	3 (N)	2 (TS)	1 (STS)		
3	Saya sebagai perangkat desa memiliki keahlian	15	24	17	0	0	222	2.22

	teknis							
4	Saya sebagai perangkat desa memiliki kemampuan mencari solusi atas permasalahan yang ada	18	37	1	0	0	241	2,41
5	Saya sebagai perangkat desa memiliki inisiatif dalam bekerja	17	37	2	0	0	239	2,39
6	Saya sebagai perangkat desa memiliki sifat keramahan dan kesopanan dalam melayani masyarakat	23	33	0	0	0	247	2,47
<b>Jumlah</b>							<b>1425</b>	<b>14,25</b>

Sumber:lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat rata-rata dari setiap indikator variabel Kompetensi Pemerintah Desa (X2), berdasarkan dari jawaban responden keenam indikator dari variabel Kompetensi Pemerintah Desa dinyatakan baik, namun indikator yang paling mendukung kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada indikator terakhir.

#### 4.1.2.3. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)

Berdasarkan hasil tabulasi data tanggapan responden terhadap pernyataan mengenai Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Wuluhan dapat dilihat tabulasi jumlah jawaban seluruh responden, yaitu:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Tanggapan Responden Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan**

No	pernyataan	Keterangan					Total	Rata-rata
		5 (SS)	4 (S)	3 (N)	2 (TS)	1 (STS)		
1	Saya sebagai perangkat desa telah menyajikan informasi yang terbuka dimedia masa	10	36	8	2	0	222	2,22
2	Saya sebagai perangkat desa menyediakan informasi yang mudah untuk diakses	16	29	11	0	0	223	2,23
3	Saya sebagai perangkat desa telah menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pencari informasi	13	28	7	8	0	214	2,14
<b>Jumlah</b>							<b>659</b>	<b>6,59</b>

Sumber:lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat rata-rata dari setiap indikator variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3), berdasarkan dari jawaban responden ketiga indikator dari variabel aksesibilitas laporan keuangan dinyatakan baik, namun indikator yang paling mendukung aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada indikator kedua.

#### 4.1.2.4. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X4)

Berdasarkan hasil tabulasi data tanggapan responden terhadap pernyataan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Wuluhan dapat dilihat tabulasi jumlah jawaban seluruh responden, yaitu:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Tanggapan Responden Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa**

No	pernyataan	Keterangan					Total	Rata-rata
		5 (SS)	4 (S)	3 (N)	2 (TS)	1 (STS)		
1	Saya sebagai perangkat desa memahami sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas	10	30	8	8	0	210	2,1
2	Saya sebagai perangkat desa memahami sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas	11	23	13	9	0	204	2,04
3	Saya sebagai perangkat desa memahami sistem dan prosedur akuntansi aset	10	28	16	2	0	217	2,17
4	Saya sebagai perangkat desa memahami sistem dan prosedur akuntansi selain kas yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas	26	28	1	1	0	219	2,19
<b>Jumlah</b>							<b>850</b>	<b>8,5</b>

Sumber:lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dilihat rata-rata dari setiap indikator variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X4), berdasarkan dari jawaban responden keempat indikator dari variabel sistem akuntansi keuangan desa dinyatakan baik,



namun indikator yang paling mendukung sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada indikator terakhir.

#### 4.1.2.5. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Berdasarkan hasil tabulasi data tanggapan responden terhadap pernyataan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Wuluhan dapat dilihat tabulasi jumlah jawaban seluruh responden, yaitu:

#### 4.10 Hasil Tanggapan Responden Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

No	pernyataan	Keterangan					Total	Rata-rata
		5 (SS)	4 (S)	3 (N)	2 (TS)	1 (STS)		
1	Saya sebagai perangkat desa melakukan penghindaran penyalahgunaan jabatan, kroupsip dan kolusi	26	28	1	1	0	247	2,47
2	Saya sebagai perangkat desa senantiasa menaati ketentuan hukum yang berlaku	29	27	0	0	0	253	2,53
3	Saya sebagai perangkat desa melakukan pengelolaan organisasi	23	29	4	0	0	243	2,43
No	pernyataan	Keterangan					Total	Rata-rata
		5 (SS)	4 (S)	3 (N)	2 (TS)	1 (STS)		
	secara efektif dan efisien							
4	Saya sebagai perangkat desa berusaha dalam	23	30	3	0	0	244	2,44

	pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi							
5	Saya sebagai perangkat desa melakukan strategi dalam melaksanakan tujuan organisasi	21	27	6	2	0	247	2,47
6	Saya sebagai perangkat desa melakukan pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil	24	31	1	0	0	247	2,47
7	Saya sebagai perangkat desa senantiasa menerapkan efektif, efisien dan ekonomis dalam finansial	19	32	5	0	0	238	2,38
8	Saya sebagai perangkat desa membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi	17	28	11	0	0	230	2,3
<b>Jumlah</b>							<b>1949</b>	<b>19,49</b>

Sumber:lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dilihat rata-rata dari setiap indikator variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y), berdasarkan dari jawaban responden kedelapan indikator dari variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dinyatakan baik, namun indikator yang paling mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap pengelolaan dana desa pada indikator kedua.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data variabel Transparansi (X1) memperoleh skor rata-rata 22,88, variabel Kompetensi Pemerintah Desa (X2)

memperoleh skor rata-rata 14,25, variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3) memperoleh skor rata-rata 6,59, variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X4) memperoleh skor rata-rata 8,5, sedangkan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) memperoleh skor rata-rata 19,49. Berdasarkan hasil skor rata-rata diatas dapat dikatakan bahwa variabel yang paling mendukung dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah variabel Transparansi.

## 4.2. Analisis Hasil Penelitian

### 4.2.1 Uji Analisis Data

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji kelayakan poin-poin pernyataan dalam kuisisioner apakah pernyataan-pernyataan tersebut dikatakan valid atau tidak. Dasar pengambilan keputusan untuk uji validitas dengan membandngkan hasil r hitung dengan r tabel dimana df-2 dengan sig 5%. Berdasarkan uraian tersebut diperoleh r tabel sebesar 0,218, maka jika  $0,218 > r$  hitung maka poin-poin pernyataan kuisisioner dinyatakan valid.

**Tabel 4.11**

#### Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Indikator	r tabel	r hitung	Keterangan
Transparansi	X1.1	0,218	0.747	Valid
	X1.2	0,218	0.890	Valid
	X1.3	0,218	0.886	Valid
	X1.4	0,218	0.776	Valid
	X1.5	0,218	0.851	Valid

	X1.6	0,218	0.865	Valid
	X1.7	0,218	0.813	Valid
	X1.8	0,218	0.830	Valid
	X1.9	0,218	0.901	Valid
Kompetensi Pemerintah Desa	X2.1	0,218	0.810	Valid
	X2.2	0,218	0.756	Valid
	X2.3	0,218	0.858	Valid
	X2.4	0,218	0.893	Valid
	X2.5	0,218	0.870	Valid
	X2.6	0,218	0.757	Valid
Aksesibilitas Laporan Keuangan	X3.1	0,218	0.667	Valid
	X3.2	0,218	0.702	Valid
	X3.3	0,218	0.380	Valid
Sistem akuntansi keuangan desa	X4.1	0,218	0.295	Valid
	X4.2	0,218	0.556	Valid
	X4.3	0,218	0.777	Valid
	X4.4	0,218	0.766	Valid
Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Y1.1	0,218	0.581	Valid
	Y1.2	0,218	0.762	Valid
	Y1.3	0,218	0.843	Valid
	Y1.4	0,218	0.835	Valid
	Y1.5	0,218	0.787	Valid
	Y1.6	0,218	0.895	Valid
	Y1.7	0,218	0.821	Valid
	Y1.8	0,218	0.762	Valid

Sumber:lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa poin-poin pada setiap pernyataan telah memenuhi syarat validitas atau dinyatakan valid, dilihat dari nilai *Pearson Correlation* atau *r* hitung lebih besar dari *r* tabel yaitu 0,218.

## 2 Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan setelah menguji poin-poin pernyataan dan sudah dikatakan valid. Uji reabilitas dapat dilakukan bersama-sama terhadap poin-poin pernyataan. Jika nilai  $\text{Alpha} > 0,60$

maka pernyataan dikatakan reliabel dengan melihat nilai *Cronbac's Alpha*.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Standart Alpha	Keterangan
Transparansi	0.943	0.600	Reliabel
Kompetensi pemerintah desa	0.896	0.600	Reliabel
Aksesibilitas laporan keuangan	0.673	0.600	Reliabel
Sistem akuntansi keuangan desa	0.873	0.600	Reliabel
Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	0.906	0.600	Reliabel

Sumber:lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa nilai *Croncbavh Alpha* dari variabel Transparansi 0.943, Kompetensi Pemerintah Desa 0.896, variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan 0.673, variabel sistem akuntansi keuangan desa 0.873, dan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 0.906. berdasarkan *Croncbach Alpha's*  $> 0.60$  maka setiap variabel dinyatakan reliabel.

#### 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian telah memnuhi syarat BLUE (*Best, Liniear, Unbiased, Estimated* ). Sebelum melakukan uji

regresi linier berganda harus melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu.

#### 1. Uji Normalitas data

Uji normalitas data ini digunakan untuk mengetahui apakah data model regresi variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dengan kriteria jika signifikan  $< 0.05$ , maka data dikatakan tidak normal dan jika signifikan  $> 0.05$  maka data dikatakan normal

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			56
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.41261771
Most Extreme Differences	Absolute		.159
	Positive		.152
	Negative		-.159
Test Statistic			.159
Asymp. Sig. (2-tailed)			.001 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.102 <sup>d</sup>
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.094
		Upper Bound	.109

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

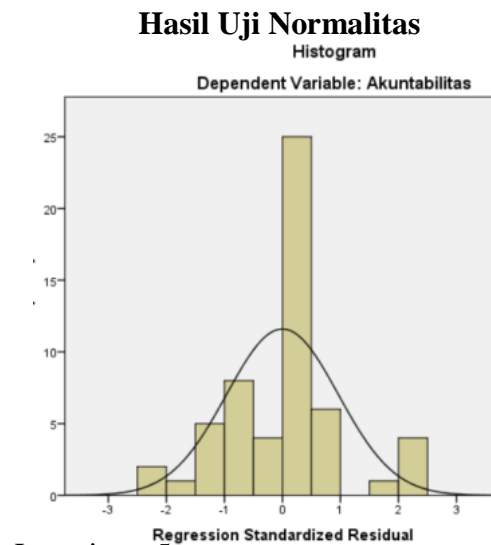
c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dikatakan bahwa hasil pengujian normalitas tidak normal dikarenakan hasil uji  $< 0.05$ , sehingga penulis memutuskan untuk menggunakan pendekatan montecarlo dimana menunjukkan hasil sebesar 0.102. atau  $> 0.05$  maka dapat dikatakan bahwa variabel dependen dalam penelitian ini berdistribusi normal.

**Gambar 4.1**



Lampiran: 5

Berdasarkan gambar diatas dapat dikatakan bahwa variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini berdistribusi normal karena pola garis mengikuti histogram yang ada.

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antara variabel independen. Semakin kecil korelasi di antara variabel bebas maka semakin baik model regresi yang diperoleh. Untuk menguji gejala multikolinearitas ini dengan melihat *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF) dimana apabila *tolerance value*  $> 0,1$  dan  $VIF < 10$  maka tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen dan apabila *tolerance value*  $< 0,1$  dan  $VIF > 10$  maka terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Transparansi	.538	1.859
	Kompetensi	.372	2.691
	Aksesibilitas	.366	2.735
	Sistem	.360	2.780

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

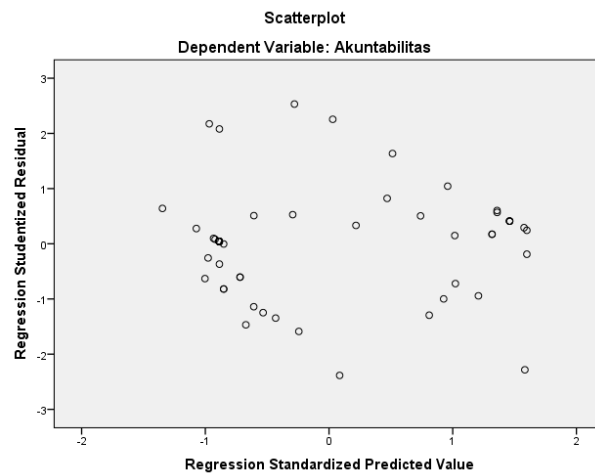
Sumber: lampiran 5

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance value* dari ke empat variabel memiliki nilai  $> 0.1$  dan nilai  $VIF < 10$  maka ke empat variabel bebas tidak terjadi multikolonieritas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah ada ketidaksamaan varian dari residual pada data pengamatan yang satu ke data pengamatan yang lain. Untuk menguji gejala heterokedastisitas, dalam penelitian ini menggunakan grafik lot antar nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).





**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Sumber : lampiran 5

Berdasarkan gambar 4.1 dengan uji *Scatterplot* terlihat bahwa grafik scatter plot, titik-titik pada gambar tersebut menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola bergelombang, melebar maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

#### 4.2.3 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara antar variabel dependen dengan variabel independen baik secara parsial maupun secara simultan

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.926	3.703		.790	.433
	Transparansi	.568	.111	.607	5.107	.000
	Kompetensi	.383	.206	.266	1.861	.068
	Aksesibilitas	.077	.321	.035	.240	.811
	Sistem	-.105	.181	-.085	-.582	.563

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: lampiran 6

Berdasarkan output di atas diperoleh hasil persamaan analisis regresi linier berganda yaitu:

$$Y = 2.926 + 0.568 x_1 + 0.383 x_2 + 0.077 x_3 - 0.105 x_4$$

Dengan konstanta sebesar 2.926, koefisien Transparansi sebesar 0.568, koefisien Kompetensi Pemerintah Desa sebesar 0.383, koefisien Aksesibilitas Laporan Keuangan sebesar 0.077, koefisien Sistem Akuntansi Keuangan Desa sebesar -0.105, dengan standart eror 0.05.

Persamaan regresi di atas dijelaskan seperti dibawah ini:

1. Konstanta (2.926) memiliki nilai koefisien positif artinya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Wuluhan sudah dilaksanakan dengan baik meskipun ke empat variabel belum maksimal.

2. Koefisien regresi variabel Transparansi (X1) sebesar 0.568 artinya setiap variabel transparansi mengalami peningkatan, maka akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Koefisien regresi berganda variabel Kompetensi Pemerintah Desa (X2) sebesar 0.383 artinya apabila variabel kompetensi pemerintah desa mengalami peningkatan maka akan mengakibatkan peningkatan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
4. Koefisien regresi berganda variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3) sebesar 0.077 yang artinya apabila variabel aksesibilitas laporan keuangan mengalami peningkatan maka akan mengakibatkan peningkatan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
5. Koefisien regresi berganda variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa sebesar -0,105 yang artinya apabila variabel sistem akuntansi keuangan desa mengalami penurunan maka akan mengakibatkan penurunan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

#### 4.2.4 Uji Hipotesis

##### 1. Uji t (Parsial)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen.

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji t (Parsial)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.926	3.703		.790	.433
	<u>Transparansi</u>	.568	.111	.607	5.107	.000
	<u>Kompetensi</u>	.383	.206	.266	1.861	.068
	<u>Aksesibilitas</u>	.077	.321	.035	.240	.811
	<u>Sistem</u>	-.105	.181	-.085	-.582	.563

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: lampiran 7

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat masing-masing t hitung pada variabel Transparansi sebesar 5.107, Kompetensi Pemerintah Desa sebesar 1.861, Aksesibilitas Laporan Keuangan sebesar 0.240, dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa sebesar 0.582. t tabel diperoleh dari  $t = (a/2 : n-k-1)$ ,  $t = (0.015 : 56-4-1)$ ,  $t = (0.025 : 51) = 2.008$ , dikatakan bahwa apabila t hitung  $< t$  tabel maka secara parsial tidak berpengaruh sedangkan apabila t hitung  $> t$  tabel maka secara parsial berpengaruh terhadap Y dapat dilihat dari signifikan apabila  $\text{sig} < 0.05$  maka berpengaruh dan apabila  $\text{sig} > 0.05$  maka tidak berpengaruh.

Berdasarkan penjabaran pengambilan keputusan diatas dan melihat hasil uji t diatas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa

Hasil analisis mengenai pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah t hitung sebesar 5.107 dan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari nilai probabilitas sig 0.05, hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

2. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil analisis mengenai kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah t hitung sebesar 1.861 dan nilai signifikansi sebesar 0.068 lebih besar dari nilai probabilitas 0.05, hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti kompetensi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

3. Pengaruh Aksesibilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil analisis mengenai aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah  $t$  hitung sebesar 0.240 dan nilai signifikansi sebesar 0.811 lebih besar dari nilai probabilitas 0.05 hal ini menunjukkan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

#### 4. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil analisis mengenai sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah  $t$  hitung sebesar -0.582 dan nilai signifikansi sebesar 0.563 lebih besar dari nilai probabilitas 0.05 yang artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya sistem akuntansi keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

#### 2 Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	505.414	4	126.353	20.129	.000 <sup>b</sup>
	Residual	320.140	51	6.277		
	Total	825.554	55			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

b. Predictors: (Constant), Sistem, Transparansi, Kompetensi, Aksesibilitas

Sumber: lampiran 7

Hasil uji simultan diatas menunjukkan nilai sig  $0.000 < 0.05$  dan nilai F hitung  $20.129 > F$  tabel 2.55 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun telah memenuhi kriteria *fit*. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas mampu menjelaskan keragaman dari akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta variabel transparansi, kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa).

#### 4.2.5. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel independen dalam model regresi mampu menjelaskan dari variabel dependennya.

**Tabel 4.18**  
**Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.782 <sup>a</sup>	.612	.582	2.505

a. Predictors: (Constant), Sistem, Transparansi, Kompetensi, Aksesibilitas

Sumber: Lampiran 8

Berdasarkan Tabel 4.18 di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.582 atau 58,2%, maka besarnya kontribusi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 0.582 atau 58.2%.

### 4.3. Interpretasi

Interpretasi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Transparansi, Kompetensi Pemerintah Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengujian pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 5.107 dengan nilai signifikan  $0.000 < 0.05$  yang artinya bahwa pengaruh transparansi secara parsial mempunyai hubungan positif dan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan



keuangan desa. Hipotesis yang menyatakan pengaruh transparansi secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diterima.

Hal ini disebabkan karena pemerintah desa telah menerapkan transparansi dengan baik, ditandai dengan pemerintah desa telah memberikan informasi secara jelas akurat dan tepat waktu, serta pemerintah desa telah menyajikan informasi yang mudah untuk diakses bagi yang membutuhkan informasi.

Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana desa kepada masyarakat, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlina dkk (2021) dimana Transparansi secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## **2. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengujian pengaruh kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa  $t$  hitung sebesar 1.861 dengan nilai signifikan  $0.068 > 0.05$  yang artinya bahwa pengaruh kompetensi pemerintah desa mempunyai hubungan positif namun tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. hipotesis yang menyatakan pengaruh

kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ditolak.

Hal ini terjadi karena rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan, dimana tingkat pendidikan adalah hal yang paling penting dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil kuisioner penelitian ini, dimana aparatur pemerintah desa yang menjadi responden dalam penelitian ini rata-rata memiliki latar belakang pendidikan lulusan SMA, sehingga rendahnya kompetensi aparatur pemerintah desa akan mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

Hal ini juga disebabkan karena perangkat desa kurang dalam meningkatkan kemampuan untuk pengetahuan yang telah dimiliki, sehingga kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu tidak memiliki peningkatan, serta kurangnya kompetensi pemerintah desa dipengaruhi oleh keahlian teknis yang dimiliki oleh setiap individu, karena kedua faktor tersebut merupakan hal yang penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indraswari (2021) yang menyatakan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil uji statistik variabel kompetensi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini juga sejalan dengan Widyatama (2017) yang meneliti tentang pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa dimana menyatakan bahwa kompetensi pemerintah desa secara signifikan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa.

### **3. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa**

Pengujian pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung sebesar 0.248 dengan nilai signifikan  $0.811 > 0.05$  yang artinya bahwa pengaruh aksesibilitas laporan keuangan secara parsial memiliki hubungan positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hipotesis yang menyatakan pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ditolak. Dikarenakan hasil dari pengujian statistik memiliki hasil  $t$  hitung lebih kecil dibandingkan dengan  $t$  tabel dimana  $t$  tabel dalam penelitian ini sebesar 2.008, dan hasil nilai signifikan lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak.

Hal ini disebabkan karena akses laporan pengelolaan dana desa saat ini hanya diletakan pada baliho-baliho yang biasanya terdapat

di halaman depan balaidesa, sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Diduga media akses yang masih sederhana yaitu dalam bentuk baliho belum dinilai oleh masyarakat mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspa dkk (2020) Mulyanto dkk (2020), Azizah et al (2015), namun tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardana (2016) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Magelang.

#### **4. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengujian pengaruh sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung sebesar  $-0.582$  dengan nilai signifikan  $0.563 > 0.05$  yang artinya bahwa pengaruh sistem akuntansi keuangan desa secara parsial memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hipotesis yang menyatakan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan desa tidak memberikan dampak terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Walaupun penggunaan sistem akuntansi keuangan desa belum maksimal tetapi desa telah mengelola keuangan desa dengan baik dan semaksimal mungkin, sehingga setiap desa akan dapat mempertanggungjawabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desanya. Hal ini juga disebabkan karena perangkat desa kurang dalam memahami sistem dan juga prosedur akuntansi aset, dimana dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sistem akuntansi keuangan desa adalah hal yang penting, karena kurangnya pemerintah desa dalam memahami serta menerapkan sistem serta prosedur akuntansi aset.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Musdalifah (2020), Saputra (2014) dan Amrul (2017) dan Ningsih (2021) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

#### **5. Pengaruh Transparansi, Kompetensi Pemerintah Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengujian pengaruh Transparansi, Kompetensi Pemerintah Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi

Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 20.129 dengan nilai signifikan  $0.000 < 0.05$  yang artinya bahwa pengaruh transparansi, kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan desa secara simultan mempunyai hubungan positif dan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hipotesis yang menyatakan transparansi, kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih dkk (2019) dimana kompetensi pemerintah desa yang professional akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, serta sistem akuntansi keuangan desa yang teratur telah diolah dengan baik oleh perangkat desa yang memiliki kompetensi yang baik. Sejalan dengan Febriana (2021) dimana transparansi dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Transparansi, Kompetensi Pemerintah Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Wuluhan. Berdasarkan pengujian dari empat variabel yang terdiri dari Transparansi, Kompetensi Pemerintah Desa, AKsesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa penulis menarik kesimpulan bahwa secara simultan keempat variabel mampu mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara lebih baik. Sedangkan secara parsial dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat pengaruh antara variabel Transparansi (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) Hal ini disebabkan karena pemerintah desa telah menerapkan transparansi dengan baik, ditandai dengan pemerintah desa telah memberikan informasi secara jelas akurat dan tepat waktu, serta pemerintah desa telah menyajikan informasi yang mudah untuk diakses bagi yang membutuhkan informasi.
2. Tidak terdapat pengaruh antara variabel Kompetensi Pemerintah Desa (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y). Hal ini disebabkan karena perangkat desa kurang dalam

meningkatkan kemampuan untuk pengetahuan yang telah dimiliki, sehingga kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu tidak memiliki peningkatan, serta kurangnya kompetensi pemerintah desa dipengaruhi oleh keahlian teknis yang dimiliki oleh setiap individu, karena kedua faktor tersebut merupakan hal yang penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

3. Tidak terdapat pengaruh antara variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y). Hal ini disebabkan karena akses laporan pengelolaan dana desa saat ini hanya diletakan pada baliho-baliho yang biasanya terdapat di halaman depan balaidesa, sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Diduga media akses yang masih sederhana yaitu dalam bentuk baliho belum dinilai oleh masyarakat mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Tidak terdapat pengaruh antara variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X4) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y). Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan desa tidak memberikan dampak terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Walaupun penggunaan sistem akuntansi keuangan desa belum maksimal tetapi desa telah mengelola keuangan desa dengan baik dan semaksimal mungkin,



sehingga setiap desa akan dapat mempertanggungjawabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desanya

## **5.2. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, implikasi yang dapat disampaikan sehubungan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah pencapaian tingkat pengelolaan keuangan desa diperlukan peningkatan penerapan prinsip transparansi, kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem akuntansi keuangan desa bagi pemerintah desa. Untuk menerapkan keempat prinsip tersebut diperlukan tingkat pemahaman dari perangkat pemerintah desa, sebab dengan tingkat pemahaman yang tinggi maka akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat tercapai, untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, seperti:

1. Pemerintah desa memberikan laporan atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat sebagai bahan evaluasi kedepan untuk lebih baik dalam pengelolaan dana desa.
2. Pemerintah desa memeberikan pelatihan khusus kepada perangkat desa terutama dalam bidang pengelolaan dana desa agar kompetensi yang dimiliki oleh setiap perangkat desa lebih

meningkat, serta kompetensi pemerintah desa yang baik akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

3. Pemerintah desa melakukan pengarsipan bukti transaksi atas penggunaan anggaran dana desa, sehingga dapat mempermudah pihak-pihak yang memerlukan data tersebut. Dengan demikian perencanaan pengelolaan dana desa kedepannya akan lebih efektif lagi.

### **5.3.Saran**

berdasarkan hasil analisi yang telah dikemukakan sehingga saran yang diajukan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah khususnya Kecamatan Wuluhan bisa mempertahankan Transparansi atau keterbukaan untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Kecamatan Wuluhan sebaiknya dapat meningkatkan kompetensi diri dari setiap pemerintah desa, dapat mempermudah dalam memberikan informasi kepada yang membutuhkan informasi, dan diharapkan agar lebih menerapkan sistem akuntansi keuangan desa agar kedepannya pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik, dengan cara melaksanakan pelatihan bagi aparatur desa selaku tim pelaksana desa terkait manajemen serta administrasi pengelolaan ADD.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen agar lebih luas lagi pembahasan dalam penelitian seperti sistem

informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, serta dapat mengambil sampel ataupun lokasi yang berbeda. Mengganti metode penelitian menjadi kualitatif untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam dan spesifik. Meletakkan variabel sistem akuntansi keuangan desa sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah variabel ini dapat memperkuat atau justru memperlemah variabel lain seperti transparansi, aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi pemerintah desa dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrul, A.M., (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *ISSN:2087.8* (1).
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal Of Islamic Finance And Accounting*, 3(1). 67-82.
- Armstrong Michael, (2004). *Performance Management*, terjemahan, Yogyakarta, Tugu Publesher.
- Azizah, N.J., & Setiawan, A. R. (2015). Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*.
- Bangun, Y. F. B. (2021). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Namo Gajah. *Jurnal Neraca*, 1(1), 1-10.
- Edison, E., Yohny, A., & Imas, K. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Erganda, I. S., Marota, R., & Ilmiyono, A. F. (2021). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Studi Pada 13 Desa Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *Jurnal Neraca*, 1(1). 1-10.
- Fadil, M. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal). *Jurnal Accounting Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 2(2). 1-12.
- Febriana, D. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Kompetensi Pemerintah Desa Transparansi Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Pemerintah Desa Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang). *Jurnal Ilmiah*, 1(1). 1-150.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Herlina, R. Taufik, T. & Nasir, A. (2021). Pengaruh Transparansi Kompetensi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *Journal Of Economic, Buisness And Accounting*, 4(2). 419-433.

Hanifah, S.1., & Praptoyo, S.(2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4 (8). 1-15.

Indraswari, N.E., Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10 (4). 1-15.

Jember, Admin Fakta. (2018). “Ratusan Warga Lojejer Tuntut Jaksa Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengelolaan Tanah Kas Desa”, <https://www.faktajember.com/ratusan-warga-lojejer-tuntut-jaksa-usut-kasus-dugaan-korupsi-pengelolaan-tanah-kas-desa/>, diakses pada 11 April 2022 pukul 9.18 WIB.

Kurngo,S., Posumah,J.H., Dengo,S. (2017). Kompetensi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tounelet Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*.

Mada, S., Kalangi, L., Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill”*,8(2). 106-115.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sumbawa. *Jurnal Akademi Akuntans*,2(1). 106-123.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mulyanto. Budiman, N.A., & Fahmi, M.N. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Penyajian Laporan Keuangan Daerah Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 6 (1). 1-17.

- Musdalifah. (2020). Pengaruh Peran Perangkat Desa Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon. *Jurnal Akuntansi*, 1(1). 1-20.
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan (2019). Pengaruh Transparansi Kompetensi Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Prubalingga). *Journal Of Economic, Business Universitas Ahmad Dahlan*, 1-20.
- Moehariono. (2018). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ningsih, L.P.P.S., (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2 (4). 183-198.
- Nurmuthmainnah, W. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Sistem Pengendalian Internal Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2). 281-297.
- Prasetyantoko, A. (2008). *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Saputra, Iskandar. (2014). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada SKPD di pemerintahan kabupaten bintan. *Skripsi*. Universitas maritime raja ali haji.
- Sari, E. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indagiri Hulu. *Faculty of Economics Riau University*, 4, 571-586.
- Saragih, N.S., & Kurnia, D. (2019). Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSERA*, 1, 1-9.

- Sudarmanto, (2009). *Kinerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*, 2(1). 1-15.
- Sweetinia, A. M., Caesari, E. P. A., Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi Sistem Pengendalian Internal Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1). 44-56.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wahida, N. (2015). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Wardana, I. (2016). *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi Univeristas Negeri Semarang.
- Widagdo, S., Dimiyati, M., Handayani, I. Y., *Metode Penelitian Manajemen: Cara Mudah Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*. Jember: Mandala Press.
- Widyatama, A., Novita, L., Diarespati. (2015). “Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)”. *Journal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 02(2). 1-21.

## Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian

### KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Sdr/I Pemerintah Desa

Di Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGISKA  
NIM : 18.104193  
Program Studi : Akuntansi  
Perguruan Tinggi : STIE MANDALA Jember

Memohon kesedian dari Bapak/Ibu/Sdr/I untuk kiranya dapat berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian ini, yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan program studi Akuntansi di STIE MANDALA Jember .

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pemerintah desa. Oleh karena itu, mohon kesediannya dalam mengisi/menjawab kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya **kuesioner ini hanya untuk kepentingan skripsi tidak untuk dipublikasikan dan kerahasiaan data yang diisi akan tetap dijaga.**

Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu/Sdr/I dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

JEMBER,.....2022

Hormat saya,

AGISKA

NIM. 18104193



## KUESIONER PENELITIAN

### Identitas Responden

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan
3. Usia : .....Tahun
4. Tingkat Pendidikan :  SD  SMP  SMA  D1  
 S1  Lain-lain
5. Jabatan : .....
6. Pengalaman Kerja : .....Tahun
7. Nama Desa : .....

### Petunjuk Pengisian

Jawablah pernyataan anda dengan memberi tanda (X) pada salah satu jawaban yang paling mendekati pendapat anda.

- Penilaian :**
- SS = Sangat Setuju
  - S = Setuju
  - N = Netral
  - TS = Tidak Setuju
  - STS = Sangat Tidak Setuju

### 1. TRANSPARANSI (X1)

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Saya memberikan informasi secara jelas, akurat dan tepat waktu					
2	Saya menyajikan informasi yang mudah untuk di akses					
3	Saya menyajikan informasi yang memadai					
4	Saya menyajikan informasi yang dapat diperbandingkan					
5	Saya menyajikan informasi sesuai dengan kondisi keuangan					
6	Saya menyajikan informasi sesuai dengan bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan					
7	Saya menyajikan informasi sesuai dengan susunan pengurus					
8	Saya menyajikan terkait informasi publik yang bersifat terbuka					
9	Saya menyajikan terkait informasi publik yang bersifat mudah diakses					

Sumber : Kuisisioner diolah oleh peneliti

### 2. Kompetensi Pemerintah Desa (X2)

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Saya sebagai perangkat desa memiliki pengetahuan yang mumpuni terhadap pekerjaan yang dilakukan					
2	Saya sebagai perangkat desa memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan yang dimiliki					

3	Saya sebagai perangkat desa memiliki keahlian tekhnis					
4	Saya sebagai perangkat desa memiliki kemampuan mencari solusi atas permasalahan yang ada					
5	Saya sebagai perangkat desa memiliki inisiatif dalam bekerja					
6	Saya sebagai perangkat desa memiliki sifat keramahan dan kesopanan dalam melayani masyarkat					

Sumber : kuisioner diolah oleh peneliti

### 3. AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN (X3)

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Saya sebagai perangkat desa telah menyajikan informasi yang terbuka dimedia masa					
2	Saya sebagai perangkat desa menyediakan informasi yang mudah untuk diakses					
3	Saya sebagai perangkat desa telah menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pencari informasi					

Sumber : diolah oleh peneliti

### 4. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA (X4)

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Saya sebagai perangkat desa memahami sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas					
2	Saya sebagai perangkat desa memahami					

	sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas					
3	Saya sebagai perangkat desa memahami sistem dan prosedur akuntansi aset					
4	Saya sebagai perangkat desa memahami sistem dan prosedur akuntansi selain kas yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas					

Sumber: Kuesioner diolah oleh peneliti

#### 5. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Y)

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Saya sebagai perangkat desa melakukan penghindaran penyalahgunaan jabatan, kroups dan kolusi					
2	Saya sebagai perangkat desa senantiasa menaati ketentuan hukum yang berlaku					
3	Saya sebagai perangkat desa melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien					
4	Saya sebagai perangkat desa berusaha dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi					
5	Saya sebagai perangkat desa melakukan strategi dalam melaksanakan tujuan organisasi					
6	Saya sebagai perangkat desa melakukan pertanggungjawaban atas kebijakan					

	yang diambil					
7	Saya sebagai perangkat desa senantiasa menerapkan efektif, efisien dan ekonomis dalam finansial					
8	Saya sebagai perangkat desa membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi					

Sumber: Kuisisioner diolah oleh peneliti

## Lampiran 2 Data Responden

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan	Pendidikan
1	Subono	Laki-laki	55 Tahun	Kepala Desa Tanjungrejo	SMA
2	Sucipto	Laki-laki	48 Tahun	Kepala Desa Kesilir	SMA
3	Umi Nurmainah S.Sos	Perempuan	40 Tahun	Pengganti Jabatan Glundengan	Sarjana (S1)
4	H Sholeh	Laki-laki	53 Tahun	Kepala Desa Ampel	SMA
5	Ali Maksum	Laki-laki	45 Tahun	Pengganti Jabatan Tamansari	SMA
6	Miftahul Munir	Laki-laki	49 Tahun	Kepala Desa Dukuh Dempok	Sarjana (S1)
7	Mohamad Sholeh SH. M. Si	Laki-laki	49 Tahun	Kepala Desa Lojejer	Lain-lain
8	Dody Sunarso	Laki-laki	60 Tahun	Sekertaris Desa Lojejer	SMA
9	Nasehan Sn	Laki-laki	49 Tahun	Sekertaris Desa Dukuhdempok	SMA
10	Gunawan Priyo U	Laki-laki	52 Tahun	Sekertaris Desa Tamansari	SMA
11	Muhlison	Laki-laki	50 Tahun	Sekertaris Desa Ampel	Sarjana (S1)
12	Drs Mukhantar	Laki-laki	50 Tahun	Sekertaris Desa Glundengan	Sarjana (S1)
13	I Sugiyanto	Laki-laki	43 Tahun	Sekertaris Desa Kesilir	SMA
14	Joto Kisworo	Laki-laki	58 Tahun	Kepala Desa Tanjungrejo	SMA
15	Moh Ibnu	Laki-laki	38 Tahun	Kaur Perencanaan Tanjungrejo	SMA
16	Muhammad Fatoni	Laki-laki	26 Tahun	Kaur Perencanaan Kesilir	Lain-lain
17	Misbahul Munir	Laki-laki	45 Tahun	Kaur Perencanaan Glundengan	SMA
18	Khoirul Eko W	Laki-laki	51 Tahun	Kaur Perencanaan Ampel	SMA
19	Syamsul S	Laki-laki	56 Tahun	Kaur Perencanaan Tamansari	Sarjana (S1)
20	Suprayitno	Laki-laki	52 Tahun	Kaur Perencanaan Dukuhdempok	Sarjana (S1)
21	Eli Evalia	perempuan	35 Tahun	Kaur Perencanaan	Sarjana (S1)

				Lojejer	
22	Derik	Laki-laki	42 Tahun	Kaur Keuangan Lojejer	Sarjana (S1)
23	Rini Winarni	Perempuan	49 Tahun	Kaur Keuangan Dukuhdempok	Sarjana (S1)
24	Emi Indrawati	Perempuan	48 Tahun	Kaur Keuangan Tamansari	Diploma (D1)
25	Sumarwiyanto	Laki-laki	50 Tahun	Kaur Keuangan Ampel	Diploma (D1)
26	Rifki Maulana R	Laki-laki	24 Tahun	Kaur Keuangan Glundengan	SMA
27	Atika Novaria	Perempuan	37 Tahun	Kaur Keuangan Kesilir	Sarjana (S1)
28	Supinah Yuliaty	Perempuan	58 Tahun	Kaur Keuangan Tanjungrejo	SMA
29	A Avievudin R M	Laki-laki	40 Tahun	Kaur Tu dan Umum Tanjungrejo	SMA
30	Sugeng Purnomo	Laki-laki	45 Tahun	Kaur TU & Umum Kesilir	SMA
31	Suhartono	Laki-laki	47 Tahun	Kaur TU & Umum Glundengan	SMA
32	Mulyono Hamid	Laki-laki	48 Tahun	Kaur TU & Umum Ampel	SMA
33	Suparjan	Laki-laki	54 Tahun	Kaur TU & Umum Tamansari	SMA
34	Suprayitno R	Laki-laki	57 Tahun	Kaur TU & Umum Dukhdempok	SMA
35	Danu Ismadi	Laki-laki	58 Tahun	Kaur TU & Umum Lojejer	SMA
36	Dafid Aryandimas	Laki-laki	28 Tahun	Kasi Pelayanan Lojejer	SMA
37	M Dona Putra	Laki-laki	30 Tahun	Kasi Pelayanan Dukuhdempok	<b>Sarjana (S1)</b>
38	M Lutfi Sulistyohadi	Laki-laki	25 Tahun	Kasi Pelayanan Ampel	<b>Sarjana (S1)</b>
39	Gombloh	Laki-laki	51 Tahun	Kasi Pelayanan Tamansari	<b>SMA</b>
40	Lukman Hadi S.T	Laki-laki	50 Tahun	Kasi Pelayanan Glundengan	<b>Sarjana (S1)</b>
41	Sugeng Eko S	Laki-laki	52 Tahun	Kasi Pelayanan Kesilir	<b>SMA</b>
42	Moh zainudin	Laki-laki	55 Tahun	Kasi Pelayanan Tanjungrejo	SMA
43	Dwi Nova Yulianto	Laki-laki	41 Tahun	Kasi Pemerintahan	SMA

				Tanjungreje	
44	Imam Muchtar	Laki-laki	45 Tahun	Kasi Pemerintahan Kesilir	Sarjana (S1)
45	Ika Widayati	Perempuan	39 Tahun	Kasi Pemerintahan Glundengan	SMA
46	Rino Dwi Ratmoyo	Laki-laki	27 Tahun	Kasi Pemerintahan Ampel	SMA
47	Arie Ulfatul W	Perempuan	42 Tahun	Kasi Pemerintahan Tamansari	Sarjana (S1)
48	Dwi Handoko	Laki-laki	46 Tahun	Kasi Pemerintahan Dukuhdempok	SMA
49	Endik Iswahyudi	Laki-laki	35 Tahun	Kasi Pemerintahan Lojejer	SMA
50	Badrus Syamsi	Laki-laki	55 Tahun	Kasi Kesejahteraan Lojejer	SMA
51	Nur Kholiq	Laki-laki	55 Tahun	Kasi Kesejahteraan Dukuhdempok	Sarjana (S1)
52	Eko Budi U	Laki-laki	55 Tahun	Kasi Kesejahteraan Tamansari	SMA
53	Nur Kholis	Laki-laki	55 Tahun	Kasi Kesejahteraan Ampel	SMA
54	Wining Setyarini S.P	Perempuan	26 Tahun	Kasi Kesejahteraan Glundengan	Sarjana (S1)
55	Mugiyati	Perempuan	54 Tahun	Kasi Kesejahteraan Kesilir	SMA
56	Bagus Anggoro	Laki-laki	28 Tahun	Kasi Kesejahteraan Tanjungrejo	Lain-lain





## Lampiran 4 Hasil Uji Instrument

### 1. Uji Validitas Data

Hasil uji validitas variabel Transparansi (X1)

Correlations											
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.630**	.635**	.404**	.478**	.589**	.771**	.537**	.600**	.747**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
X1.2	Pearson Correlation	.630**	1	.865**	.704**	.748**	.803**	.571**	.681**	.753**	.890**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
X1.3	Pearson Correlation	.635**	.865**	1	.672**	.725**	.801**	.677**	.671**	.671**	.886**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
X1.4	Pearson Correlation	.404**	.704**	.672**	1	.616**	.549**	.617**	.505**	.654**	.776**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
X1.5	Pearson Correlation	.478**	.748**	.725**	.616**	1	.751**	.570**	.764**	.833**	.851**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
X1.6	Pearson Correlation	.589**	.803**	.801**	.549**	.751**	1	.581**	.766**	.766**	.865**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
X1.7	Pearson Correlation	.771**	.571**	.677**	.617**	.570**	.581**	1	.587**	.710**	.813**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
X1.8	Pearson Correlation	.537**	.681**	.671**	.505**	.764**	.766**	.587**	1	.854**	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
X1.9	Pearson Correlation	.600**	.753**	.671**	.654**	.833**	.766**	.710**	.854**	1	.901**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Total_X1	Pearson Correlation	.747**	.890**	.886**	.776**	.851**	.865**	.813**	.830**	.901**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Pemerintah Desa (X2)

### Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.501**	.642**	.685**	.697**	.573**	.810**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56
X2.2	Pearson Correlation	.501**	1	.581**	.616**	.626**	.385**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.003	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56
X2.3	Pearson Correlation	.642**	.581**	1	.695**	.665**	.520**	.858**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56
X2.4	Pearson Correlation	.685**	.616**	.695**	1	.725**	.731**	.893**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56
X2.5	Pearson Correlation	.697**	.626**	.665**	.725**	1	.620**	.870**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56
X2.6	Pearson Correlation	.573**	.385**	.520**	.731**	.620**	1	.757**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000	.000		.000
	N	56	56	56	56	56	56	56
Total_X2	Pearson Correlation	.810**	.756**	.858**	.893**	.870**	.757**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	56	56	56	56	56	56	56

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3) dan Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X4)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	Total_X3	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	Total_X4
X3.1	Pearson Correlation	1	.235	.323*	.667**	.302*	.278*	.195	.222	.295*
	Sig. (2-tailed)		.081	.015	.000	.024	.038	.149	.100	.028
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56
X3.2	Pearson Correlation	.235	1	.380**	.702**	.377**	.475**	.612**	.463**	.556**
	Sig. (2-tailed)	.081		.004	.000	.004	.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56
X3.3	Pearson Correlation	.323*	.380**	1	.829**	.797**	.804**	.155	.799**	.777**
	Sig. (2-tailed)	.015	.004		.000	.000	.000	.256	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Total_X3	Pearson Correlation	.667**	.702**	.829**	1	.708**	.742**	.407**	.712**	.766**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.002	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56
X4.1	Pearson Correlation	.302*	.377**	.797**	.708**	1	.867**	.297*	.816**	.897**
	Sig. (2-tailed)	.024	.004	.000	.000		.000	.026	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56
X4.2	Pearson Correlation	.278*	.475**	.804**	.742**	.867**	1	.422**	.869**	.947**
	Sig. (2-tailed)	.038	.000	.000	.000	.000		.001	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56
X4.3	Pearson Correlation	.195	.612**	.155	.407**	.297*	.422**	1	.410**	.595**
	Sig. (2-tailed)	.149	.000	.256	.002	.026	.001		.002	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56
X4.4	Pearson Correlation	.222	.463**	.799**	.712**	.816**	.869**	.410**	1	.928**
	Sig. (2-tailed)	.100	.000	.000	.000	.000	.000	.002		.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Total_X4	Pearson Correlation	.295*	.556**	.777**	.766**	.897**	.947**	.595**	.928**	1
	Sig. (2-tailed)	.028	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Total_Y
Y1.1	Pearson Correlation	1	.639**	.389**	.337*	.168	.413**	.535**	.269*	.581**
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	.011	.215	.002	.000	.045	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Y1.2	Pearson Correlation	.639**	1	.658**	.471**	.388**	.684**	.576**	.506**	.762**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Y1.3	Pearson Correlation	.389**	.658**	1	.620**	.780**	.738**	.548**	.547**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Y1.4	Pearson Correlation	.337*	.471**	.620**	1	.766**	.805**	.661**	.566**	.835**
	Sig. (2-tailed)	.011	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Y1.5	Pearson Correlation	.168	.388**	.780**	.766**	1	.685**	.511**	.528**	.787**
	Sig. (2-tailed)	.215	.003	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Y1.6	Pearson Correlation	.413**	.684**	.738**	.805**	.685**	1	.686**	.656**	.895**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Y1.7	Pearson Correlation	.535**	.576**	.548**	.661**	.511**	.686**	1	.655**	.821**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Y1.8	Pearson Correlation	.269*	.506**	.547**	.566**	.528**	.656**	.655**	1	.762**
	Sig. (2-tailed)	.045	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Total_Y	Pearson Correlation	.581**	.762**	.843**	.835**	.787**	.895**	.821**	.762**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 2. Uji Reabilitas

Hasil Uji Reabilitas Variabel Transparansi (X1)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.943	9

Hasil Uji Reabilitas Variabel Kompetensi Pemerintah Desa (X2)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.896	6

Hasil Uji Reabilitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.673	3

Hasil Uji Reabilitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X4)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.873	4

Hasil Uji Reabilitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.906	8

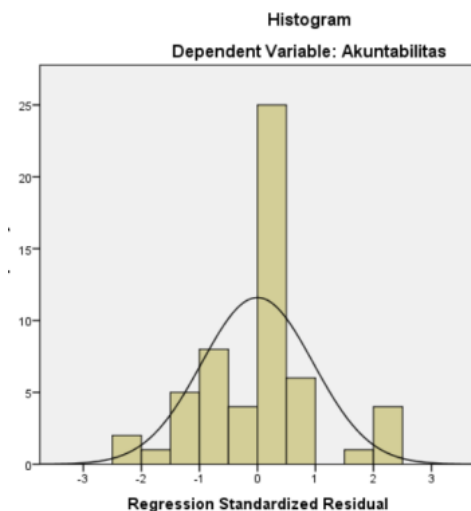
## Lampiran 5 Hasil Uji Asumsi Klasik

### 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			56
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.41261771
Most Extreme Differences	Absolute		.159
	Positive		.152
	Negative		-.159
Test Statistic			.159
Asymp. Sig. (2-tailed)			.001 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.102 <sup>d</sup>
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.094
		Upper Bound	.109

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

### 2. Gambar histogram uji normalitas



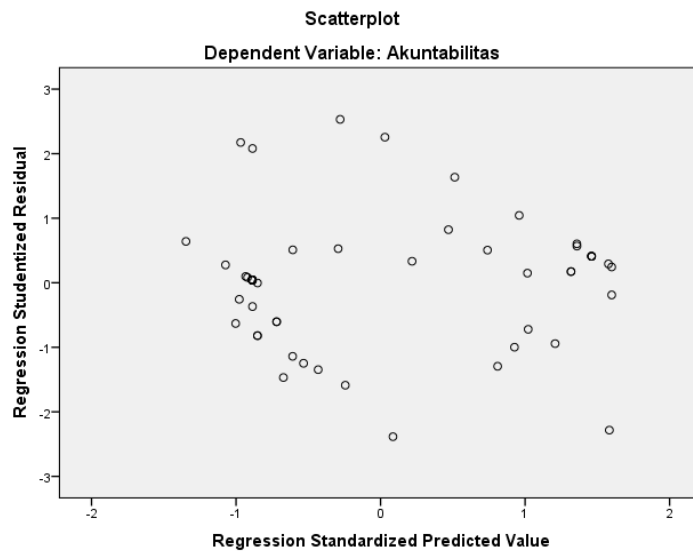
### 3. Hasil Uji Multikolonieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.926	3.703		.790	.433		
Transparansi	.568	.111	.607	5.107	.000	.538	1.859
Kompetensi	.383	.206	.266	1.861	.068	.372	2.691
Aksesibilitas	.077	.321	.035	.240	.811	.366	2.735
Sistem	-.105	.181	-.085	-.582	.563	.360	2.780

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

#### 4. Hasil Uji Heterokedastisitas





## Lampiran 6 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.926	3.703		.790	.433
	Transparansi	.568	.111	.607	5.107	.000
	Kompetensi	.383	.206	.266	1.861	.068
	Aksesibilitas	.077	.321	.035	.240	.811
	Sistem	-.105	.181	-.085	-.582	.563

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

## Lampiran 7 Hasil Uji Hipotesis

### 1. Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.926	3.703		.790	.433
	Transparansi	.568	.111	.607	5.107	.000
	Kompetensi	.383	.206	.266	1.861	.068
	Aksesibilitas	.077	.321	.035	.240	.811
	Sistem	-.105	.181	-.085	-.582	.563

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

### 2. Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	505.414	4	126.353	20.129	.000 <sup>b</sup>
	Residual	320.140	51	6.277		
	Total	825.554	55			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

b. Predictors: (Constant), Sistem, Transparansi, Kompetensi, Aksesibilitas

### Lampiran 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.782 <sup>a</sup>	.612	.582	2.505

a. Predictors: (Constant), Sistem, Transparansi, Kompetensi, Aksesibilitas